

Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?



Nila Warda

Rachma Indah Nurbani

Elza Elmira

Ridho Al Izzati

Mayang Rizky

KERTAS KERJA SMERU

Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?

Nila Warda

Elza Elmira

Mayang Rizky

Rachma Indah Nurbani

Ridho Al Izzati

Editor

Fandi Muhammad Hizbullah

Gunardi Handoko

Wiwin Purbaningrum

The SMERU Research Institute

September 2019

Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?

Penulis: Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, dan Ridho Al Izzati

Editor: Fandi Muhammad Hizbullah, Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum

Foto Sampul: Novita Maizir

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Warda, Nila

KERTAS KERJA SMERU: Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?. /
Ditulis oleh Nila Warda; Elza Elmira; Mayang Rizky; Rachma Indah Nurbani; Ridho Al Izzati;
Editor Fandi Muhammad Hizbullah; Gunardi Handoko; Wiwin Purbaningrum.

v; 40p.; 30 cm.

ISBN 978-602-7901-92-6

ISBN 978-602-7901-93-3 (PDF)

1. ketimpangan 2. Perdesaan 3. modal penghidupan

I. Judul

362.582 –ddc'23

Diterbitkan Oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, September 2019



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kertas kerja ini dapat selesai berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan TIFA yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Firman Hidayat, Plt. Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro, Bappenas; Sunaji Zamroni, Direktur IRE; Muhammad Syukri, kandidat doktor dari University of Western Australia; dan Harry Seldadyo, dosen Universitas Atmajaya yang telah meninjau substansi hasil studi ini dan turut menyempurnakan kertas kerja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan dari pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang telah hadir dalam kelompok diskusi terfokus dan memberikan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan penajaman temuan studi ini.

Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?

Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Indah Nurbani, dan Ridho Al Izzati

Studi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan menentukan ketimpangan ekonomi di desa-desa di Indonesia. Studi ini menganalisis data-data sekunder dalam periode 2000–2010 dengan menggunakan model *first-difference*. Ketimpangan dalam desa diukur melalui indeks Gini pengeluaran yang bersumber dari Peta Kemiskinan Indonesia 2000 dan Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010. Faktor-faktor penentu ketimpangan diukur melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi modal penghidupan di desa yang disusun dari data Sensus Penduduk 2000 dan 2010, serta data Potensi Desa 2000 dan 2011. Analisis heterogenitas juga diterapkan untuk melihat variasi ketimpangan antarkelompok wilayah, yaitu (i) antara Indonesia bagian barat dan timur dan (ii) antara Pulau Jawa dan non-Jawa, serta antarpola penghidupan. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar indikator pembangunan ekonomi dan sosial berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi desa, beragamnya sektor pekerjaan, keberadaan kompleks pertokoan, perbaikan akses masyarakat terhadap air minum layak, dan pembangunan saluran irigasi di desa, serta aksi kolektif masyarakat merupakan indikator-indikator yang secara signifikan berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi. Hanya 4 dari 23 indikator berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah, yaitu (i) akses rumah tangga terhadap listrik yang lebih baik, (ii) rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk yang lebih kecil, (iii) rata-rata lama sekolah masyarakat desa yang lebih tinggi, dan (iv) keberadaan koperasi di desa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya afirmatif diperlukan untuk pemerataan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk memanfaatkan hasil pembangunan. Untuk mengendalikan ketimpangan dalam desa, diperlukan pula pemahaman mengenai hierarki sosial masyarakat desa yang berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan kelompok termiskin.

Kata kunci: ketimpangan dalam desa, perdesaan, modal penghidupan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pembangunan dan Ketimpangan	3
2.2 Modal Penghidupan dan Ketimpangan	4
III. METODOLOGI	9
3.1 Data	9
3.2 Metode	11
IV. HASIL DAN DISKUSI	13
4.1 Analisis Deskriptif	13
4.2 Analisis Inferensial	14
4.3 Diskusi	16
V. KESIMPULAN	23
DAFTAR ACUAN	24
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan di perdesaan Indonesia	1
Gambar 2. Kurva Kuznets	4
Gambar 3. Hasil estimasi tingkat ketimpangan dalam desa (seluruh sampel)	15

DAFTAR LAMPIRAN

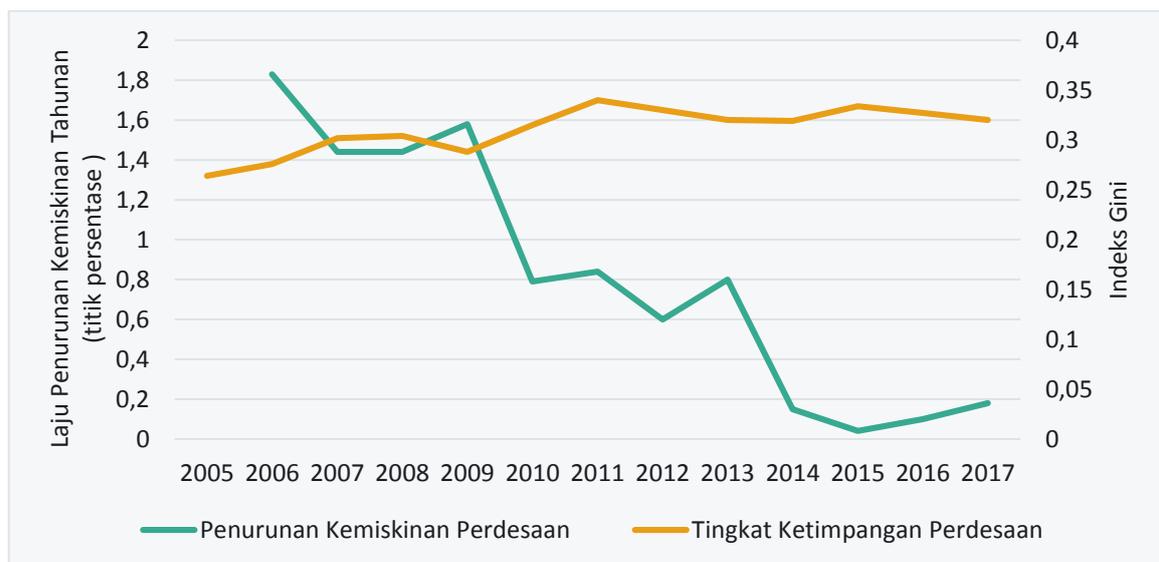
Lampiran 1 Tabel A1. Statistika Deskriptif	32
Lampiran 2 Tabel A2. Hasil Estimasi Model OLS	34
Lampiran 3 Tabel A3. Hasil Estimasi Metode <i>Bootstrap</i>	37

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
DFID	Department for International Development
EDI	indeks keragaman ekonomi (<i>economic diversity index</i>)
KDP	Kecamatan Development Program
OLS	kuadrat terkecil biasa (<i>ordinary least square</i>)
PKKPM	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Podes	Pendataan Potensi Desa
P2B	Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Raskin	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar
SAE	estimasi wilayah kecil (<i>small area estimation</i>)
Sakerti	Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia
SD	sekolah dasar
SDA	sumber daya alam
SDM	sumber daya manusia

I. PENDAHULUAN

Meskipun tingkat kemiskinan nasional menurun secara drastis selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan di perdesaan masih belum mengalami penurunan serupa. Tingkat kemiskinan di perdesaan pun dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan. Rata-rata penurunan kemiskinan tahunan di perdesaan juga lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan dan paling rendah di tingkat nasional. Dalam empat tahun terakhir (2013–2016), tingkat kemiskinan di perdesaan rata-rata hanya menurun sebesar 0,06 titik persentase. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan rata-rata tahunan paling tinggi, yaitu 0,21 titik persentase, dan disusul tingkat kemiskinan nasional dengan penurunan tahunan sebesar 0,17 titik persentase. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan pun terus naik dalam periode yang sama. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di perdesaan yang terus meningkat menggambarkan makin jauhnya rata-rata konsumsi masyarakat miskin dari batas kemiskinan berdasarkan tingkat konsumsi bulanan. Lebih parah lagi, di antara masyarakat miskin perdesaan sendiri pun terjadi ketimpangan distribusi tingkat konsumsi yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks keparahan kemiskinan (P2). Secara ironis, indikator yang sama di wilayah perkotaan mengalami tren penurunan dan cenderung stagnan pada skala nasional. Dengan kronisnya kondisi kemiskinan dan tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan (lebih dari 60%), upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan mutlak diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional.



Gambar 1. Penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan di perdesaan Indonesia

Sumber: Data penurunan kemiskinan di perdesaan diperoleh dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2005–2017.

Data tingkat ketimpangan di perdesaan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2018.

Beberapa studi menemukan bahwa ketimpangan merupakan faktor penting di balik perlambatan laju penurunan kemiskinan. Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto (2009) menemukan bahwa ketimpangan melemahkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal yang sama juga ditemukan oleh Marrero dan Serven (2018) melalui analisis pada 121 negara maju dan berkembang dalam periode 1960–2000. Di Afrika, Mussa (2014) membuktikan secara spesifik bahwa peningkatan ketimpangan dapat menaikkan angka kemiskinan. Dalam periode 2005–2017, tren ketimpangan dan kemiskinan di perdesaan Indonesia juga menunjukkan pola serupa. Tingkat kemiskinan turun sebesar 1,83 titik persentase pada 2006 saat

tingkat ketimpangan (indeks Gini) 0,264 dan hanya sebesar 0,18 titik persentase pada 2017 ketika tingkat ketimpangan melonjak menjadi 0,33. Dalam periode tersebut, laju penurunan tingkat kemiskinan menjadi lebih cepat setiap kali terjadi penurunan ketimpangan seperti yang terjadi pada 2009 dan 2013, serta pada 2015–2017. Sebaliknya, laju penurunan kemiskinan melambat ketika terjadi peningkatan ketimpangan, seperti dalam periode 2005–2007 dan 2009–2010 (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan upaya pengendalian ketimpangan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, pemerintah dan mitra-mitra pembangunan secara besar-besaran mendorong berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tingkat desa. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (Kecamatan Development Program, KDP)¹ pada 1997 dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada 2007–2014, Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) pada 2014–2015, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) pada 2015–2016. Sementara itu, pada akhir 2014, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa disahkan. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam pembangunan nasional.

Keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan di desa juga ditentukan oleh dinamika ketimpangan di antara masyarakat desa, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa studi. Pada masyarakat yang lebih timpang, praktik klientelisme lebih mungkin terjadi (Barret, 2015). Sebagai konsekuensinya, implementasi program pembangunan berbasis masyarakat akan rentan terhadap eksploitasi oleh kalangan elite desa yang memiliki modal lebih komprehensif, dan pada akhirnya akan mengeksklusi kelompok marginal yang memiliki sumber daya terbatas (Gibson dan Woolcock, 2008). Dengan demikian, program pembangunan di desa dengan masyarakat yang timpang tidak akan secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan dan, sebaliknya, justru akan melanggengkan ketimpangan. Dalam pendistribusian program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada 2005, ditemukan bahwa tingkat ketimpangan turut menentukan ketepatan sasaran program. Sim, Negara, dan Suryahadi (2015) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang lebih timpang, *exclusion error*² cenderung rendah, terutama pada BLT yang pendistribusiannya dilakukan secara terpusat, dan *elite capture*³ cenderung lebih rentan terjadi, terutama pada program Raskin yang pendistribusiannya dilakukan oleh pemerintah desa.

Mengingat pentingnya peran dinamika ketimpangan di desa dalam keberhasilan upaya penurunan kemiskinan, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan menentukan tingkat ketimpangan ekonomi dalam desa⁴. Keterbatasan data ketimpangan di tingkat desa membatasi periode analisis hanya dari 2000 sampai 2010. Data ketimpangan ekonomi yang

¹KDP adalah sebuah proyek berbasis masyarakat yang digagas Pemerintah Indonesia yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan (Bhatnagar *et al.*, 2003). Proyek ini dimulai pada 1997 di 25 desa. Melalui proyek ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan desa dan sumber daya yang mereka miliki (Pollock *et al.*, 2015).

² Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pada kenyataannya tidak mendapatkan akses terhadap program tersebut.

³ *Elite capture* terjadi ketika kelompok-kelompok atau individu-individu dalam masyarakat dapat—karena status ekonomi, politik, atau sosialnya—memengaruhi distribusi sumber daya masyarakat dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. *Elite capture* tak jarang ditemukan dalam program-program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

⁴ Desa dalam studi ini adalah desa yang berada hanya di wilayah perdesaan dan tidak mencakup kelurahan.

diukur dengan indeks Gini tingkat desa diambil dari data Peta Kemiskinan 2000 dan Peta Kemiskinan dan Penghidupan 2010 yang dikeluarkan The SMERU Research Institute. Beragamnya informasi yang tersedia dalam sensus penduduk 2000 dan 2010 dapat memberikan gambaran karakteristik masyarakat perdesaan sampai tingkat terbawah, yaitu tingkat desa. Di samping itu, keragaman kondisi desa akan ditangkap melalui informasi yang bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2000 dan 2011. Meskipun data yang digunakan tidak mutakhir, temuan studi ini dapat menjadi masukan dalam upaya pengendalian ketimpangan saat ini.

Kertas kerja ini merupakan kelanjutan kertas kerja pertama dalam serangkaian kertas kerja tentang dinamika ketimpangan di perdesaan Indonesia dengan dukungan Yayasan TIFA. Pada kertas kerja sebelumnya, analisis deskriptif dilakukan untuk mengamati berbagai faktor dalam kerangka modal penghidupan dan mengaitkannya dengan dinamika ketimpangan ekonomi yang terjadi di desa. Termasuk dalam modal penghidupan tersebut adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal infrastruktur fisik, modal keuangan, dan modal sosial. Kertas kerja pertama memaparkan beberapa hal yang diduga terkait dengan atau turut berkontribusi pada ketimpangan ekonomi di desa. Hal-hal tersebut adalah, antara lain, rendahnya capaian pendidikan kelompok termiskin di desa, dominasi kelompok terkaya dalam penguasaan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih tersebar di desa-desa maju, dan ancaman kohesi sosial akibat keberagaman identitas yang diiringi sikap primordialisme yang berujung pada konflik sosial.

Studi dalam kertas kerja ini didesain untuk menyempurnakan studi dalam kertas kerja pertama. Studi ini dilakukan melalui pengujian statistik faktor-faktor dalam kesatuan modal penghidupan yang secara signifikan menentukan tingkat ketimpangan di desa-desa di Indonesia. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan mitra pembangunan dalam melakukan intervensi pembangunan di desa agar lebih berfokus pada hal-hal yang dapat mendorong penurunan ketimpangan dan mewaspadaikan hal-hal yang dapat meningkatkan ketimpangan kendati pada saat yang sama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Kertas kerja ini akan diikuti kertas kerja ketiga yang menyajikan analisis dekomposisi perubahan ketimpangan berdasarkan faktor-faktor utama yang, dalam kertas kerja ini, ditemukan berkorelasi secara signifikan dengan ketimpangan di desa.

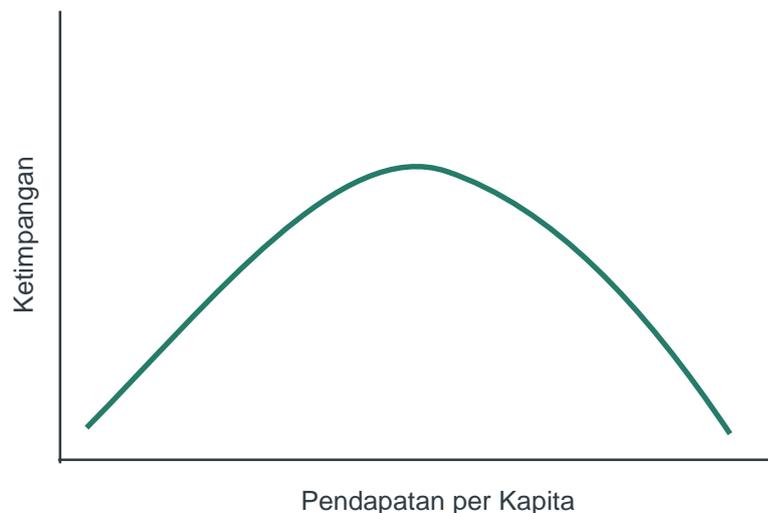
Pada bagian kedua kertas kerja ini, akan dipaparkan tinjauan terhadap studi-studi terdahulu mengenai ketimpangan ekonomi dan bagaimana pembangunan ekonomi serta berbagai aspek modal penghidupan dapat terkait dengan hal tersebut. Data dan metode analisis akan dijelaskan pada bagian ketiga. Sementara itu, hasil dan diskusi akan dibahas pada bagian keempat yang kemudian diikuti kesimpulan pada bagian akhir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan dan Ketimpangan

Proses pembangunan ditandai dengan transformasi struktur ekonomi. Suatu negara pada awalnya bertumpu pada sektor pertanian, lalu berpindah ke sektor yang lebih modern, yakni industri, yang memiliki nilai tambah (*value added*) lebih tinggi. Sektor pertanian ditandai dengan tingkat produktivitas dan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Menurut Kuznets (1955), proses pembangunan ini memiliki konsekuensi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam studi yang sama, Kuznets berhipotesis bahwa pada awal pembangunan sebuah negara memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Kondisi tersebut

didukung oleh melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian dengan tingkat kemampuan (keahlian atau pendidikan) yang relatif rendah. Seiring dengan berkembangnya sektor industri, sebagian tenaga kerja di sektor pertanian berpindah ke sektor ini sehingga sebagian penduduk akan memiliki tingkat upah, produktivitas, dan keterampilan yang lebih tinggi. Pada saat proses tersebut terjadi, tingkat ketimpangan akan naik karena adanya perbedaan pendapatan antara penduduk yang bekerja di sektor industri dan yang bekerja di sektor pertanian. Sejalan dengan makin berkembangnya pembangunan, ketimpangan akan terus naik dan akan turun ketika pembangunan sudah makin maju (lihat Gambar 2). Pada titik inilah terjadi transformasi struktur ekonomi, dari tradisional menjadi lebih modern. Hal ini ditandai dengan perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan atau peralihan dari wilayah berkarakteristik perdesaan menjadi wilayah yang lebih berkarakteristik perkotaan, pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri, dan peningkatan kemampuan (keahlian atau tingkat pendidikan) dalam jangka panjang.



Gambar 2. Kurva Kuznets

Sumber: Kuznets, 1955.

Proses pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Kuznets dapat juga dikaitkan dengan kondisi modal penghidupan masyarakat. Pada masa awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan didukung hanya oleh beberapa kalangan dengan modal penghidupan yang memadai sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kecepatan proses penyesuaian akan bergantung pada kecepatan masyarakat, terutama kelompok kesejahteraan bawah, dalam mengakumulasi modal penghidupan dan keterlibatannya dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, hambatan struktural sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat miskin dan rentan dalam proses akumulasi modal penghidupan. Hal inilah yang mencegah kelompok tersebut untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi sehingga ketimpangan kesejahteraan pun tidak dapat dihindari.

2.2 Modal Penghidupan dan Ketimpangan

Secara umum, modal penghidupan didefinisikan sebagai kesatuan sumber daya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol hidup mereka dan terlibat dalam hubungan sosial yang efektif sehingga tujuan hidup mereka dapat tercapai. Modal penghidupan dapat diperoleh, dibangun, diakumulasi, ditingkatkan, dan ditransfer antargenerasi (Ford Foundation, 2002; Moser,

2006) dan terdiri atas modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, dan modal alam (Ford Foundation, 2002; Siegel, 2005; Moser, 2006). Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*), kelima modal penghidupan tersebut menjadi kesatuan modal pentagon sebagai satu bagian dari keseluruhan kerangka penghidupan berkelanjutan (DFID⁵, 2001) dan berinteraksi secara simultan dengan struktur, kelembagaan, dan kebudayaan lokal dalam masyarakat ataupun dengan kebijakan nasional yang berlaku di tingkat lokal. Struktur dan kelembagaan tersebut dapat menjadi penghalang atau pembuka peluang bagi masyarakat untuk mentransformasikan modal penghidupan yang dimiliki agar berkelanjutan (Moser, 2006) dan menjadi strategi untuk mencapai tujuan penghidupan yang diinginkan (DFID, 2001).

Memahami modal penghidupan yang dimiliki masyarakat miskin adalah bentuk upaya menilai kemungkinan mereka untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan (Moser, 2006). Oleh karena itu, pendekatan penghidupan berkelanjutan sering disandingkan dengan kerangka kerja untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini karena modal penghidupan dapat bertahan dan diolah untuk menghasilkan manfaat ekonomi, psikologi, dan sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk bertahan dari guncangan ekonomi dan kerentanan, serta melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Ford Foundation, 2002) sehingga memungkinkan terciptanya distribusi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Dalam studi ini, kelima modal penghidupan tersebut digunakan untuk mengetahui dinamika penghidupan dan korelasinya dengan ketimpangan ekonomi dalam desa. Memanfaatkan pendekatan modal penghidupan sebagai kerangka analisis ketimpangan berarti melihat ketimpangan tidak hanya sebagai lebarnya kesenjangan antara masyarakat termiskin dan terkaya dalam desa, tetapi juga keadaan yang membuat modal penghidupan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang penghidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Ulasan berikut menjelaskan bagaimana setiap aspek modal penghidupan dapat berkorelasi dengan ketimpangan.

2.2.1 SDM dan Ketimpangan Pendapatan

Kualitas SDM yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Blaug, 1976) merupakan determinan pertumbuhan suatu wilayah, termasuk daerah perdesaan (Chiritescu, Balan, dan Bucur, 2015). Berbagai studi telah menunjukkan bagaimana pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak dapat menurunkan ketimpangan moneter melalui efeknya pada angkatan kerja. Tingginya rata-rata lama pendidikan angkatan kerja berkorelasi negatif dengan ketimpangan, sementara tingginya ketimpangan capaian pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan (Park, 1996). Hal ini dikonfirmasi sebuah temuan studi bahwa perbedaan modal pendidikan dasar adalah kontributor utama kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Indonesia (Akita, 2017).

Salah satu cara untuk menurunkan ketimpangan adalah memperluas akses masyarakat terhadap program yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Menurut Castelló dan Doménech (2002), peningkatan ketimpangan dapat terjadi karena akses terhadap pendidikan memengaruhi tingkat kemampuan kerja, pengetahuan, dan informasi yang memengaruhi produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya memengaruhi perbedaan pendapatan. Selain pendidikan, kesehatan yang dimiliki seseorang dapat menjadi determinan ketimpangan. Meningkatnya pengeluaran akibat sakit, berkurangnya jumlah tenaga kerja, serta buruknya kondisi pertumbuhan anak dari keluarga

⁵Department for International Development.

miskin secara umum mengurangi kesempatan seseorang untuk bekerja dan mengakses pendapatan yang layak (Smith, 1999). Kualitas kesehatan pada masa dewasa dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap bantuan sosial yang mulai diterima sejak dalam kandungan hingga masa kanak-kanak (Hoynes, Schanzenbach, dan Almond, 2012; Johnson dan Schoeni, 2011; Smith *et al.*, 1997).

Dalam kaitannya dengan analisis sumber ketimpangan dalam desa, peran SDM diukur melalui variabel-variabel yang menggambarkan akses peningkatan kapasitas individu. Berdasarkan teori ketimpangan ekonomi yang disampaikan oleh Roemer (1998), beberapa cara pengukuran ketimpangan seharusnya tidak hanya memperhitungkan variabel-variabel yang dapat dikontrol oleh individu, tetapi juga variabel-variabel yang sifatnya lebih makro. Variabel di luar usaha individu ini mencakup, antara lain, akses terhadap layanan dasar yang merata, termasuk jumlah dan kualitas program (Aguirreche, 2012). Sebuah studi juga menemukan bahwa makin merata distribusi sumber daya dalam berbagai kondisi, makin kecil ketimpangan pendapatan suatu masyarakat (Ferreira dan Gignoux, 2011). Peningkatan akses pendidikan dasar juga dapat mengatasi masalah maldistribusi akses dan secara langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Ram, 1989; 1990). Selain itu, tidak meratanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tenaga kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak merupakan kontributor utama pada kondisi sakit dan kematian di perdesaan (Zhao, 2006).

2.2.2 Infrastruktur Fisik dan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketimpangan Pendapatan

Studi-studi sebelumnya mengenai infrastruktur fisik dan keuangan sebagai faktor pendorong perubahan ketimpangan berujung pada dua kesimpulan. Pertama, terdapat hubungan negatif antara modal fisik dan ketimpangan (Calderon dan Serven, 2004; Charlery, Qaim, dan Smith-Hall, 2016). Pembangunan infrastruktur membuka peluang bagi kelompok berpendapatan terbawah untuk mengakses aset-aset produktif sehingga terjadi peningkatan nilai modal mereka (Charlery, Qaim, dan Smith-Hall, 2016). Kemudahan akses berkat keberadaan infrastruktur—termasuk telekomunikasi, listrik, jalan, air bersih, dan sanitasi—berperan penting dalam pengintegrasian individu dan rumah tangga ke dalam kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk pemanfaatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan modal manusia mereka (Ferranti *et al.*, 2003). Kedua, pembangunan infrastruktur dapat pula berperan dalam peningkatan ketimpangan. Studi empiris multitahun yang menggunakan data panel di kota-kota di India menunjukkan bahwa meskipun peluang produktif telah tersedia untuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses, manfaat pembangunan infrastruktur seperti jalan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan tertinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan terendah (Bajar dan Rajeev, 2016). Mereka yang berpendapatan tinggi dapat membelanjakan uang lebih banyak untuk barang-barang mewah yang sebelumnya tidak tersedia di pasar ketika jalan belum dibangun. Akses terhadap listrik pun meningkatkan ketimpangan di kota-kota yang relatif miskin. Meskipun sebagian besar konsumsi listrik di perdesaan terjadi pada kegiatan pertanian, hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat menikmati manfaat listrik, yaitu petani pemilik lahan.

Literatur mengenai hubungan antara modal finansial dan ketimpangan juga berujung pada dua kesimpulan. Sebagai mesin pertumbuhan, modal finansial dapat meningkatkan ketimpangan pada masa awal perkembangan sistem keuangan meskipun pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan (Clarke, Xue, dan Zou, 2006; Honohan, 2004; Halac dan Schmukler, 2003). Melalui studi empiris dengan data panel di Amerika Serikat sepanjang 2000–2007, Bae, Han, dan Sohn (2012) menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di suatu wilayah—yang diukur melalui rasio tabungan terhadap pendapatan—memiliki korelasi positif dengan ketimpangan. Namun, dalam studi yang sama, Bae, Han, dan Sohn juga menemukan bahwa penetrasi lembaga keuangan—yang dilihat secara geografis melalui rasio jumlah lembaga keuangan untuk setiap 100 mil persegi

wilayah—memiliki korelasi negatif dengan tingkat ketimpangan. Ketika sistem keuangan di suatu wilayah memiliki jangkauan yang lebih luas, masyarakat berpendapatan terendah dapat mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah sehingga ketimpangan dapat menurun. Bahkan, efek penurunan ketimpangan dari penetrasi lembaga keuangan lebih besar untuk wilayah-wilayah yang masyarakatnya sudah menyadari pentingnya pemerataan ekonomi.

2.2.3 Sumber Daya Alam dan Ketimpangan Pendapatan

Keterkaitan antara SDA dan lingkungan dengan ketimpangan dapat dijelaskan dengan, antara lain, kemampuan setiap kelompok penduduk untuk mengatasi kerentanan yang muncul karena risiko dari kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA. Ashraf *et al.* (2017) menemukan bahwa ketiadaan air bersih berdampak pada kesehatan dan kegiatan ekonomi. Penduduk, terutama yang ada dalam kelompok miskin, harus beralih ke sumber air yang kurang bersih. Hal ini menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit menular dan tak menular, serta berkurangnya transaksi keuangan dan kegiatan produktif karena mereka, terutama perempuan, harus mengalokasikan waktunya untuk berjalan lebih jauh guna memperoleh air bersih. Temuan ini mengonfirmasi temuan studi Smith (1999) yang menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap air bersih menyebabkan buruknya kondisi pertumbuhan anak dari keluarga miskin sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk bekerja dan mengakses pendapatan yang layak ketika mereka dewasa.

Studi yang dilakukan Furlong dan Kooy (2017) juga menemukan bahwa penggunaan air tanah dalam yang berlebihan di lingkungan kelompok kaya berhubungan dengan peningkatan salinitas (kadar garam) air tanah dangkal di lingkungan kelompok miskin. Pompa yang kuat di lingkungan kelompok kaya menarik air tanah dalam dalam jumlah besar yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Ketika permukaan tanah turun, risiko banjir meningkat. Setiap kali terjadi banjir, air kotor dan limbah mencemari pasokan air leding dan air tanah di dataran rendah. Ini berarti bahwa penduduk miskin yang tinggal di wilayah marginal memiliki kerentanan terhadap banjir yang lebih tinggi dan kualitas air yang lebih buruk. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi pada teknologi pengolahan air rumah tangga atau untuk membeli air minum kemasan. Sementara itu, kelompok kaya dan pihak industri memilih untuk keluar dari sistem jaringan pipa yang tersedia dengan membuat saluran pompa air yang lebih kuat agar dapat mengekstraksi air tanah dalam untuk pasokan air mereka sendiri. Kemampuan kelompok kaya dan pihak industri untuk memilih keluar dari sistem jaringan air terpusat tersebut membatasi kemungkinan untuk subsidi silang baik bagi konsumsi maupun koneksi air di lingkungan kelompok miskin.

Kasus di atas menguatkan studi Boyce (1994) yang melihat degradasi lingkungan sebagai akibat sampingan kegiatan ekonomi. Besarnya dampak pencemaran lingkungan pada peningkatan ketimpangan bergantung pada relasi kuasa antara pihak yang memperoleh keuntungan dari pencemaran dan mereka yang mengeluarkan biaya akibat pencemaran. Ketika pihak yang diuntungkan lebih berkuasa daripada yang dirugikan, pencemaran lingkungan akan terus terjadi karena mereka akan terus mengejar keuntungan tanpa memedulikan konsekuensinya pada masa yang akan datang. Paparan terhadap pencemaran lingkungan dapat berkontribusi pada ketimpangan, dan prosesnya dapat terjadi secara sendiri-sendiri atau bersamaan (Deguen dan Zmirou-Navier, 2010). Dari seluruh populasi, kelompok penduduk miskin cenderung lebih sering terpapar sumber polusi (*differential exposure*). Situasi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan lingkungan, yaitu bahwa seharusnya tidak boleh ada kelompok yang lebih terpapar pencemaran daripada kelompok lainnya. Kedua, populasi secara umum rentan terhadap dampak pencemaran lingkungan pada kesehatan (*differential susceptibility*). Namun, kelompok miskin lebih rentan terhadap dampak tersebut karena mereka cenderung lebih sering terpapar sumber polusi.

2.2.4 Sumber Daya Sosial dan Ketimpangan Pendapatan

Putnam (1995) mendefinisikan sumber daya atau modal sosial sebagai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, yaitu jejaring, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan anggota masyarakat melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Keefektifan langkah masyarakat untuk mencapai tujuan bersama ditentukan oleh kohesi sosial atau integrasi masyarakat sebagai proksi modal sosial. Indikator-indikator yang biasa digunakan untuk mengukur modal sosial bervariasi, mulai dari (i) tingkat kepercayaan antarindividu (Coleman, 1988; Knack dan Keefer, 1997) yang merupakan bentuk dasar modal sosial; (ii) solidaritas sosial (Botterman, 2015); (iii) keragaman identitas sosial (Easterly, Ritzen, dan Woolcock, 2006) dan konflik atau kriminalitas (Easterly, 2001) yang merupakan aspek kohesi sosial; hingga (iv) partisipasi masyarakat dalam organisasi atau kegiatan kemasyarakatan (Beard dan Cartmill, 2007) sebagai bentuk aksi kolektif.

Easterly, Ritzen, dan Woolcock (2006) meyakini bahwa kohesi sosial yang kuat akan menghasilkan sistem kelembagaan yang kuat pula yang muncul dalam bentuk kebebasan berpendapat dan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Hal ini akan mendorong kebijakan yang inklusif terhadap masyarakat miskin dan marginal melalui keterwakilan politik setiap golongan. Dalam studi yang sama, Easterly, Ritzen, dan Woolcock lebih jauh menjelaskan bahwa di negara berkembang, salah satu kendala utama yang dihadapi politisi dalam melakukan reformasi adalah kurangnya dukungan sosial akibat lemahnya kohesi sosial. Masyarakat dengan kohesi sosial yang lemah akan rentan terhadap konflik sosial, perseteruan, atau tindak kriminal.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan antara modal sosial dan ketimpangan. Knack dan Keefer (1997) menemukan bahwa dalam masyarakat dengan tingkat ketimpangan yang rendah—ditandai dengan minimnya polarisasi kelompok dan adanya aturan kelembagaan resmi yang mengontrol pemerintah, terdapat tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun, Easterly, Ritzen, dan Woolcock (2006) berpendapat bahwa hubungan antara modal sosial dan ketimpangan tidak hanya berjalan searah. Dalam studi yang sama, Easterly, Ritzen, dan Woolcock juga menemukan adanya hubungan saling menentukan antara sistem kelembagaan yang baik—sebagai akibat dari kohesi sosial yang kuat—dan tingkat ketimpangan yang rendah—diukur dari proporsi kelas menengah yang lebih besar dalam perekonomian.

Pada pelaksanaannya, modal sosial memiliki beberapa kendala dalam menurunkan tingkat ketimpangan. Fungsi modal sosial sebagai “penghubung” diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menyuarakan kebutuhannya dan dapat memengaruhi struktur kelembagaan yang ada, baik formal seperti pemerintahan desa maupun informal seperti pertemuan rukun warga (Woolcock, 2000). Berbeda dengan bentuk modal penghidupan lainnya, modal sosial tidak bisa dengan mudah dibentuk dan disimpan mengingat sifatnya yang dinamis dan selalu bisa dinegosiasikan (Long, 2001). Oleh karena itu, modal sosial tidak bisa secara otomatis muncul dari hubungan dengan masyarakat sekitar; begitu pun rasa saling percaya yang tidak bisa dengan mudah terbangun dari sekadar interaksi berulang kali dengan tetangga (Cleaver, 2004). Bahkan, proses sosial cenderung mempertahankan struktur sosial yang sarat dengan *elite capture*. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin makin sulit memenuhi dan menyuarakan kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat (Cleaver, 2004). Pada akhirnya, justru sangatlah mungkin modal sosial makin melanggengkan ketimpangan.

III. METODOLOGI

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam kesatuan modal penghidupan yang secara signifikan menentukan ketimpangan di desa, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data-data sekunder. Dua bagian berikut ini memaparkan data-data yang dimanfaatkan dan model ekonomi yang digunakan dalam studi ini.

3.1 Data

Ketimpangan kesejahteraan dapat dilihat melalui data indeks Gini pengeluaran per kapita. Data ini bersumber dari Peta Kemiskinan 2000 dan Peta Kemiskinan dan Penghidupan 2010 yang dirilis SMERU (Suryahadi *et al.*, 2005; Negara dan Sumarto, 2014). Indeks Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan ekonomi yang lebih rendah, dan sebaliknya. Berikut adalah rumus penghitungan indeks Gini:

$$Gini = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i-1})$$

dengan y_i adalah proporsi pengeluaran kumulatif individu i dalam suatu N populasi. Dalam studi ini, y_i diperoleh dari hasil estimasi $\ln \ln \tilde{y}_{ch}$ dalam simulasi yang menggunakan model estimasi wilayah kecil (*small area estimation, SAE*) (Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw, 2003), seperti terlihat pada rumus berikut:

$$\ln \ln \tilde{y}_{ch} = X_{ch}\beta + u_{ch}$$

Setelah diperoleh estimasi $\ln \ln \tilde{y}_{ch}$ melalui model SAE, indeks Gini desa dihitung dengan rumus berikut:

$$Gini = \frac{W + 1}{W - 1} - \frac{2}{W(W - 1)\tilde{y}} \sum w_i y_i [\rho_i + 0.5(w_i - 1)],$$

$$\text{dengan keterangan } \rho_{i+1} = \rho_i + w_i$$

Dalam rumus di atas, w_i adalah bobot (*weight*) dari rumah tangga i , dan W adalah jumlah keseluruhan populasi desa.

Terdapat 20 variabel yang menunjukkan indikator modal penghidupan dan 3 variabel sebagai kontrol tingkat kesejahteraan desa. Observasi mencakup 27.584 desa yang secara paralel tersedia pada dua titik waktu, yaitu tahun 2000 dan 2010. Informasi mengenai modal penghidupan di desa diperoleh dari data Podes dan data sensus penduduk. Data Podes yang digunakan adalah data Podes 2000 dan 2011. Sementara itu, data sensus penduduk yang digunakan adalah data Sensus Penduduk 2000 dan 2010. Detail indikator untuk setiap modal penghidupan beserta sumber datanya tersedia pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Indikator dan Sumber Data

Indikator	Proksi	Sumber Data
Ketimpangan	Indeks Gini konsumsi	Peta Kemiskinan Indonesia 2000, Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010
SDM	Rata-rata lama sekolah	Sensus Penduduk 2000, 2010
	Proporsi penduduk usia produktif	Sensus Penduduk 2000, 2010
	Insiden kekurangan gizi	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Banyaknya jenis wabah penyakit yang terjadi setahun terakhir	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
Modal Fisik	Ketersediaan saluran irigasi	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Ketersediaan sanitasi sehat	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Cakupan rumah tangga dengan akses listrik	Sensus Penduduk 2000, 2010
	Rasio fasilitas kesehatan/10 penduduk	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Akses keluar desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Jalan terluas di desa yang sudah beraspal	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
Modal Finansial	Ketersediaan koperasi	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Ketersediaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Ketersediaan bank	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Ketersediaan pasar permanen	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Ketersediaan kompleks pertokoan	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
Modal Sosial	Banyaknya jenis kriminalitas yang terjadi	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Banyaknya jenis upaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Adanya kegiatan kerja bakti/gotong royong	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
Sumber Daya Alam	Banyaknya jenis pencemaran yang terjadi	Sensus Potensi Desa 2000, 2011
	Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak	Sensus Penduduk 2000, 2010
Kontrol Kondisi Kesejahteraan	Indeks keragaman ekonomi (<i>economic diversity index</i> , EDI)	Sensus Penduduk 2000, 2010
	Rata-rata konsumsi per kapita	Peta Kemiskinan Indonesia 2000, Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010
	Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan	Sensus Penduduk 2000, 2010

Selain informasi dasar yang diolah dari data Podes ataupun sensus penduduk, dibuat pula sebuah indeks yang menggambarkan keragaman sektor pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat desa, yaitu indeks keragaman ekonomi (EDI). Indeks ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia dalam data sensus penduduk. Di bawah ini adalah rumus penghitungan EDI.

$$EDI_i = - \sum_{j=1}^n p_j \cdot \ln p_j$$

Rumus ini mengadopsi indeks Shannon-Wiener⁶ (Dewi, Belcher, dan Puntodewo, 2004; Baumgärtner, 2006). Dalam rumus ini, p_j adalah proporsi pekerja sektor j di desa i yang bernilai 0 hingga $\ln \ln p_j$. Untuk memudahkan interpretasi, nilai EDI diubah menjadi persentase yang bernilai 0 hingga 1. Nilai EDI yang lebih besar menunjukkan lebih beragamnya sektor pekerjaan yang diakses masyarakat desa, dan sebaliknya. Makin beragamnya sektor pekerjaan mengindikasikan makin berkurangnya ketergantungan masyarakat desa pada sektor pertanian. Merujuk pada tahapan pembangunan oleh Kuznets (1955), desa yang seperti ini merupakan desa yang sedang berada dalam proses transformasi struktural, dari tahap tradisional menjadi lebih modern.

3.2 Metode

Studi ini menerapkan analisis inferensial untuk menguji secara statistik faktor-faktor dalam kesatuan modal penghidupan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan menentukan tingkat ketimpangan dalam desa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan model berikut:

$$GINI_{dt} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{dt} + \mu_d + \epsilon_t \quad [1]$$

$GINI_{dt}$ adalah indeks Gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Indeks Gini menggunakan skala 0 sampai 1. Nilai Gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Tanda d menunjukkan unit desa dan t menunjukkan tahun.

Sebagai variabel dependen, tingkat ketimpangan dalam desa diukur melalui serangkaian variabel independen X_{dt} yang tergabung dalam kerangka modal penghidupan, yaitu SDM, SDA, modal fisik (infrastruktur), modal keuangan, dan modal sosial. Setiap modal dijelaskan dengan beberapa indikator, seperti yang tertera pada Tabel 1. Arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ditunjukkan oleh tanda dan besaran koefisien α yang mengikuti setiap variabel. Koefisien α merupakan sebuah estimator yang didapatkan dari proses estimasi nilai parameter⁷ berdasarkan informasi yang tersedia pada data sampel. Sementara itu, faktor keragaman karakteristik desa yang tetap antarwaktu, μ_d , dan faktor yang mungkin terjadi di semua desa tetapi berubah antarwaktu, ϵ_t , merupakan komponen galat (*error term*), yaitu faktor-faktor yang turut menentukan tingkat ketimpangan tetapi tidak tertangkap oleh model ini.

Model ekonometri tersebut memiliki sejumlah permasalahan yang menyebabkan hasil estimasi tidak akurat, yaitu adanya variabel yang tidak diperhitungkan (*omitted variable bias*) dan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*). Permasalahan-permasalahan tersebut akan memperbesar nilai μ_d . Akibat keterbatasan data, model ini tidak bisa menangkap variabel lain yang turut menentukan tingkat ketimpangan. Keterbatasan data ini dapat bersumber dari dalam desa, seperti kelembagaan desa atau struktur politik masyarakat, atau dari supradesa, seperti kebijakan atau pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten atau provinsi. Variabel-variabel tersebut, selain dapat berkorelasi dengan ketimpangan sebagai variabel dependen, dapat berkorelasi dengan variabel independen. Selain itu, beberapa variabel yang bersumber dari data Podes merupakan hasil pelaporan oleh kepala desa. Beberapa laporan, seperti laporan kejadian

⁶Indeks Shannon-Wiener merupakan indeks keragaman yang umum ditemukan dalam literatur tentang ekologi. Indeks ini biasa digunakan untuk mengukur keragaman spesies yang hidup dalam suatu ekosistem. Rumus penghitungan indeks Shannon-Wiener diambil dari studi Baumgärtner (2006). Sementara itu, penggunaan EDI dalam studi ini merujuk pada studi Dewi, Belcher, dan Puntodewo (2004) yang juga menggunakan indeks yang sama.

⁷Parameter merupakan koefisien dalam fungsi regresi populasi (*population regression function*). Karena merupakan fungsi pada data populasi, nilai koefisien tersebut tetap (tidak mengandung *error term*), tetapi nilainya tidak diketahui. Oleh karena itu, nilainya dihitung melalui fungsi regresi sampel (*sample regression function*) (Gujarati dan Porter, 2009).

kejahatan atau malnutrisi, rentan terhadap kesalahan pengukuran. Variabel yang berbentuk indeks, seperti EDI, juga tidak lepas dari kemungkinan salah perhitungan.

Permasalahan dalam spesifikasi model tersebut diatasi dengan menerapkan model perbedaan pertama (*first-difference*). Dengan kata lain, estimasi dilakukan dengan menggunakan selisih nilai di setiap variabel dependen dan independen antara 2000 dan 2010. Berikut adalah model *first-difference*:

$$GINI_{dt} - GINI_{dt-1} = \beta_1(X_{dt} - X_{dt-1}) + (\epsilon_t - \epsilon_{t-1}) \quad [2]$$

Model *first-difference* juga dapat dituliskan dalam bentuk rumus diferensial sebagai berikut:

$$\Delta GINI_d = \beta_1 \Delta X_d + \Delta \epsilon_t \quad [3]$$

Liker, Augustyniak, dan Duncan (1985) menunjukkan bahwa model *first-difference* tepat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen pada proses perubahan variabel dependen, alih-alih nilai asli variabel pada titik waktu tertentu. Selain itu, dengan menggunakan estimasi *first-difference*, heterogenitas desa yang tertangkap oleh μ_d tereliminasi dan menyisakan faktor-faktor yang berubah antarwaktu, ϵ_t . Meski demikian, interpretasi estimator sama dengan estimasi kuadrat terkecil biasa (*ordinary least square*, OLS), yaitu setiap kenaikan satu unit variabel independen (X) akan berpengaruh pada variabel dependen (GINI) sebesar nilai estimator.

Selain model utama tersebut (model [3]), beberapa tes heterogenitas (*heterogeneity test*) dan uji ketegaran (*robustness check*) dilakukan. Tujuan tes heterogenitas dalam studi ini adalah melihat variasi temuan berdasarkan karakteristik wilayah dan karakteristik perubahan tipologi kehidupan utama masyarakat di suatu desa. Pembagian kelompok wilayah yang dimaksud adalah antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, serta antara Indonesia bagian barat dan timur. Perubahan tipologi kehidupan utama yang dimaksud mencakup (i) bertahan di sektor pertanian, (ii) bertahan di sektor nonpertanian, (iii) beralih ke sektor nonpertanian, dan (iv) beralih ke sektor pertanian. Sementara itu, *robustness check* perlu dilakukan mengingat indeks Gini sebagai variabel dependen dalam model ini tidak didapatkan dari penghitungan langsung, melainkan dari estimasi melalui model SAE⁸. Oleh karena itu, metode *bootstrap* diterapkan untuk mendapatkan hasil estimasi determinan ketimpangan desa yang lebih akurat, yaitu estimasi yang makin mendekati nilai parameternya. Selain itu, estimator *bootstrap* diyakini lebih stabil (DiCiccio dan Efron, 1996). Prinsip dasar metode ini adalah pengambilan ulang sampel dari data sampel yang ada dengan sistem penggantian secara berulang dan acak hingga seratus kali. Estimasi parameter juga dilakukan berulang untuk setiap set sampel tersebut. Hasil estimasi melalui metode *bootstrap* adalah nilai rata-rata estimator dari seratus sampel acak tersebut (Efron, 1979; Johnson, 2001).

⁸Keterangan lebih detail mengenai model SAE dalam penghitungan indeks Gini desa dapat dilihat pada Suryahadi *et al.* (2005) dan Negara dan Sumarto (2014).

IV. HASIL DAN DISKUSI

Pemaparan temuan studi ini dikelompokkan menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah analisis deskriptif data-data yang digunakan pada studi ini (lihat Tabel A1-Lampiran 1 untuk hasil analisisnya). Analisis inferensial dipaparkan pada bagian kedua beserta variasi temuan antarwilayah di Indonesia dan antarstrategi penghidupan (lihat Tabel A2-Lampiran 2 dan Tabel A3-Lampiran A3 untuk hasil analisisnya). Sementara itu, temuan utama didiskusikan pada bagian ketiga.

4.1 Analisis Deskriptif

Rata-rata desa mengalami kenaikan ketimpangan dalam kurun sepuluh tahun yang ditunjukkan oleh indeks Gini, yaitu dari 0,17 pada 2000 menjadi 0,21 pada 2010. Tingkat ketimpangan ini lebih rendah daripada tingkat ketimpangan antarmasyarakat di seluruh wilayah perdesaan yang dilaporkan oleh BPS, yaitu 0,24 pada 1999 dan 0,315 pada 2010. Perubahan tingkat ketimpangan pada data ini, yaitu 0,04, juga relatif lebih rendah daripada perubahan tingkat ketimpangan pada data resmi yang diterbitkan pemerintah, yaitu 0,075. Perlu diperhatikan bahwa indeks Gini yang digunakan dalam analisis ini merupakan hasil estimasi sebagaimana dijelaskan dalam Suryahadi *et al.* (2005) dan Negara dan Sumarto (2014) (lihat Subbab 3.1). Indeks Gini tersebut menggambarkan ketimpangan antarkelompok masyarakat dalam desa, bukan ketimpangan antarkelompok masyarakat di seluruh wilayah perdesaan sebagaimana angka resmi yang diterbitkan BPS.

Pada saat tingkat ketimpangan naik, tingkat kesejahteraan desa juga naik. Pengeluaran per kapita masyarakat desa rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Selain itu, sektor pekerjaan di desa terlihat makin beragam yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai EDI. Walaupun proporsi penduduk usia produktif relatif stagnan, terjadi peningkatan cukup berarti pada indikator SDM lain. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata lama pendidikan sebesar 23% dalam satu dekade, yakni dari 5,47 tahun pada 2000 menjadi 6,72 tahun pada 2010. Hal ini berarti bahwa hingga 2010 rata-rata penduduk desa telah menyelesaikan sekolah dasar (SD).

Makin beragamnya kesempatan kerja yang dapat dijangkau oleh masyarakat perdesaan mungkin juga didorong oleh perbaikan infrastruktur umum, seperti irigasi pertanian, dan akses ke luar desa yang bisa dilalui kendaraan beroda empat. Meski demikian, jumlah desa yang sebagian besar jalannya sudah berupa jalan aspal tidak meningkat. Perubahan struktur ekonomi perdesaan yang makin bergeser ke sektor nonpertanian dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Dalam kurun 2000–2010, terjadi penambahan jenis pencemaran lingkungan di perdesaan.

Dalam periode ini, masyarakat perdesaan juga menikmati perbaikan akses terhadap fasilitas dasar yang tersedia di desa pada sebagian besar indikator yang diobservasi. Dalam hal modal finansial, terdapat peningkatan jumlah infrastruktur yang mendukung perekonomian di desa dalam sepuluh tahun terakhir, seperti koperasi, bank, toko, dan pasar. Selain itu, akses masyarakat terhadap fasilitas dan layanan dasar seperti sanitasi, air minum layak, dan listrik mengalami peningkatan. Pada saat yang sama, terdapat penurunan beberapa indikator secara rata-rata, seperti ketersediaan BPR dalam hal modal finansial dan rasio fasilitas kesehatan per sepuluh penduduk dalam hal modal fisik. Penurunan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar ini diikuti peningkatan jumlah desa yang melaporkan gizi buruk yang dialami warganya dan penambahan jenis wabah penyakit yang terjadi di desa.

Pada saat proporsi keluarga rentan mengalami penurunan yang ditandai dengan berkurangnya proporsi rumah tangga dikepalai perempuan, kedekatan antarwarga desa yang menggambarkan

modal sosial juga mengalami penurunan. Hal ini menyiratkan makin lemahnya kohesi sosial masyarakat yang diindikasikan dengan makin sedikitnya bentuk upaya masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan makin sedikitnya desa-desa yang melaporkan adanya kegiatan rukun warga seperti kerja bakti atau gotong royong. Meski demikian, dalam kurun sepuluh tahun, kejadian kriminalitas di desa tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung turun.

4.2 Analisis Inferensial

Pemaparan analisis pada bagian ini didasarkan pada hasil estimasi dengan model *first-difference* yang kekuatannya sudah diuji dengan metode *bootstrap*⁹. Selain itu, seluruh pembahasan akan menitikberatkan pada variabel dengan signifikansi korelasi di bawah 5%.¹⁰ Dari 23 variabel independen yang dianalisis pada studi ini, terdapat 14 variabel yang secara signifikan menentukan tingkat ketimpangan dalam sebuah desa untuk keseluruhan sampel desa. Sebagian besar variabel-variabel tersebut berkorelasi dengan ketimpangan dalam desa yang lebih tinggi; hanya empat variabel yang menunjukkan sebaliknya, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk desa yang lebih tinggi, proporsi penduduk desa yang mengakses listrik yang lebih besar, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk desa yang lebih kecil, dan koperasi yang tersedia di desa (Gambar 3). Hasil tersebut bervariasi ketika tingkat ketimpangan dipisahkan berdasarkan kelompok wilayah, yaitu antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur dan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, serta berdasarkan pola penghidupan, yaitu desa yang mayoritas penduduknya mengalami perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian atau sebaliknya, maupun desa yang tidak mengalami perubahan (lihat Tabel A3-Lampiran 3).

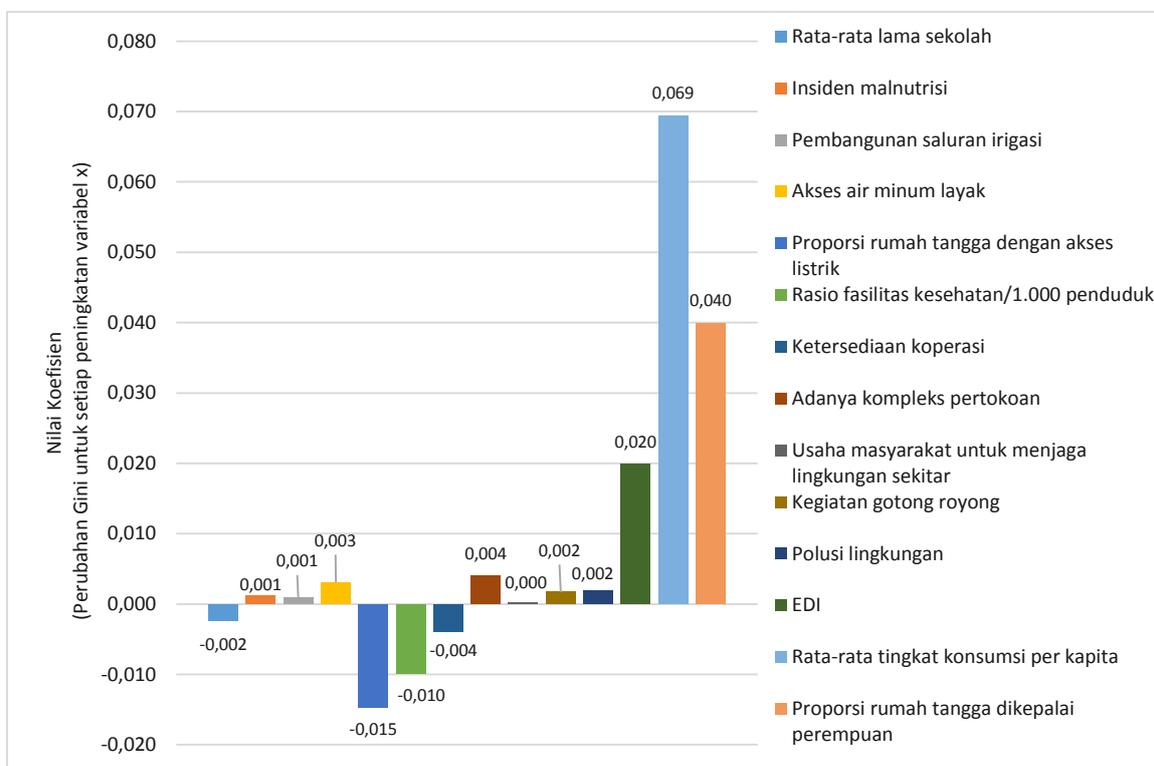
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator SDM yang berkorelasi secara konsisten dengan ketimpangan dalam desa, baik di semua wilayah sampel maupun antarwilayah subsampel. Rata-rata lama sekolah masyarakat desa yang lebih tinggi berkorelasi dengan ketimpangan dalam desa yang lebih rendah. Hal ini terutama berlaku di Pulau Jawa. Sebaliknya, tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dan ketimpangan di desa-desa di luar Pulau Jawa. Sementara itu, di kelompok wilayah Indonesia bagian timur dan barat terdapat korelasi negatif yang sama; ketika rata-rata lama sekolah masyarakat di sebuah desa lebih tinggi, tingkat ketimpangan cenderung rendah. Hasil yang sama juga diperoleh ketika analisis dipisahkan berdasarkan perubahan tipologi penghidupan utama masyarakat desa.

Temuan menarik didapati pada variabel usia produktif yang korelasinya dengan ketimpangan desa bervariasi antararea geografis. Secara umum, variabel ini tidak berkorelasi secara signifikan dengan ketimpangan desa. Namun, hubungan di antara kedua variabel tersebut menjadi lebih beragam ketika dipisahkan berdasarkan area geografis dan tipologi penghidupan. Di Pulau Jawa, makin besar proporsi penduduk usia produktif di suatu desa, makin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Namun, di luar Pulau Jawa, korelasi di antara keduanya negatif meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil. Hal ini berarti bahwa desa-desa dengan proporsi penduduk usia produktif lebih besar cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah. Sementara itu, korelasi positif antara proporsi penduduk usia produktif dan ketimpangan ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat dan korelasi negatif ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara geografis, modal SDM cenderung memiliki efek meningkatkan ketimpangan di wilayah-

⁹Hasil model *first-difference* sebelum diuji dengan metode *bootstrap* dapat dilihat pada Tabel A2 (Lampiran 2), sementara yang sudah melalui metode *bootstrap* dapat dilihat pada Tabel A3 (Lampiran 3). Meskipun tidak terdapat banyak perbedaan hasil antara keduanya, hasil estimasi setelah melalui metode *bootstrap* lebih akurat (lihat Subbab 3.3).

¹⁰Pada koefisien dengan signifikansi 10%, interval keyakinan (*confidence interval*) akan melewati nol yang berarti bahwa signifikansi koefisien ini lemah.

wilayah yang sudah maju, tetapi memiliki efek menyetarakan (*equalizing*) di wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Hal ini didukung estimasi ketimpangan desa antarjenis penghidupan. Penduduk usia produktif berkorelasi positif dengan ketimpangan pada semua tipologi, tetapi korelasi signifikan hanya ditemukan di desa-desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor nonpertanian, baik pada 2000 maupun 2010, dan dengan tingkat kesejahteraan yang cenderung lebih tinggi.



Gambar 3. Hasil estimasi tingkat ketimpangan dalam desa (seluruh sampel)

Sumber: Diolah dari hasil estimasi yang tertera pada Tabel 3 (Lampiran 3).

Keterangan: Variabel yang ditampilkan adalah yang signifikan pada 5% atau 1%.

Temuan mengenai variasi pengaruh usia produktif antararea geografis didukung temuan bahwa desa-desa yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi memiliki tingkat ketimpangan yang juga tinggi. Rata-rata tingkat konsumsi per kapita merupakan indikator nyata tingkat kesejahteraan yang korelasinya dengan tingkat ketimpangan desa konsisten positif signifikan pada semua jenis sampel. EDI yang menggambarkan besarnya peluang masyarakat desa untuk bekerja di berbagai jenis sektor pekerjaan juga mengonfirmasi positifnya hubungan antara tingkat kesejahteraan dan tingkat ketimpangan. Variabel ini ditemukan konsisten positif signifikan pada semua jenis sampel, kecuali di desa yang didominasi pekerja sektor nonpertanian pada kedua periode waktu. Meski demikian, tingginya proporsi rumah tangga dikepalai perempuan yang menggambarkan banyaknya kelompok rentan di suatu desa ditemukan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi hampir pada semua kelompok sampel.

Keberadaan infrastruktur fisik memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan ketimpangan dalam desa, tergantung pada jenis infrastruktur fisiknya. Keberadaan saluran irigasi memiliki korelasi positif yang signifikan di wilayah perdesaan pada umumnya, serta di kelompok wilayah Indonesia bagian timur dan di kelompok wilayah luar Pulau Jawa pada khususnya; di kelompok wilayah lain, variabel ini tidak ditemukan berkorelasi secara signifikan. Kualitas jalan yang lebih baik berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah luar Jawa, tetapi berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah di desa-desa yang penghidupannya bersumber dari sektor

nonpertanian. Hal yang sama juga berlaku pada ketersediaan kompleks pertokoan di desa. Sementara itu, makin luasnya cakupan masyarakat desa yang dapat mengakses listrik atau fasilitas kesehatan secara konsisten berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah di semua kelompok geografis dan di wilayah yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Pada tipologi penghidupan di sektor nonpertanian, akses terhadap listrik dan fasilitas kesehatan tidak dapat menjelaskan ketimpangan dalam desa secara signifikan.

Meskipun peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, beberapa indikator lain yang berkaitan dengan aspek kesehatan menunjukkan arah yang berlawanan. Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses air minum layak justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Kejadian malnutrisi dan pencemaran lingkungan yang secara pasti berdampak buruk pada kesehatan juga ditemukan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.

Adanya korelasi positif antara beberapa indikator pembangunan infrastruktur dan tingkat ketimpangan tidak serta-merta mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur harus dihentikan guna mencegah tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Hal ini justru menunjukkan pentingnya melihat kondisi struktural yang menyebabkan pembangunan tersebut memperlebar kesenjangan pada periode waktu observasi. Sebagai contoh, terdapat variasi hubungan antara indikator modal finansial dan tingkat ketimpangan desa. Jenis lembaga keuangan yang lebih mungkin diakses oleh masyarakat miskin, seperti koperasi, tampak berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Sementara itu, keberadaan lembaga perbankan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan tipologi penghidupan, korelasi antara keberadaan koperasi dan tingkat ketimpangan yang lebih rendah cenderung tampak pada wilayah yang tidak mengalami perubahan struktur ekonomi, baik yang sangat bergantung pada sektor pertanian maupun yang sudah terlepas dari sektor pertanian sejak awal periode observasi. Sementara itu, keberadaan lembaga perbankan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah yang sedang mengalami transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian atau dari sektor nonpertanian ke sektor pertanian.

Temuan menarik lainnya diperoleh dari berbagai indikator modal sosial. Indikator kedekatan masyarakat, yaitu upaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan kegiatan gotong royong, justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Variabel upaya menjaga keamanan lingkungan ditemukan positif dan signifikan di seluruh wilayah sampel, subsampel Pulau Jawa, dan subsampel wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, variabel kegiatan gotong royong ditemukan signifikan tidak hanya di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur, tetapi juga di wilayah yang masih bergantung pada sektor pertanian. Variabel insiden kriminalitas tidak dapat menjelaskan variasi tingkat ketimpangan antardesa.

4.3 Diskusi

Bagian ini mengulas beberapa determinan utama ketimpangan perdesaan yang ditemukan dalam studi ini. Dari 23 variabel yang tergabung dalam kelima modal penghidupan dan kontrol kesejahteraan desa, hampir semuanya ditemukan berkorelasi secara signifikan dengan ketimpangan dalam desa, setidaknya pada beberapa kelompok sampel. Analisis heterogenitas tidak menunjukkan perbedaan hasil yang berarti jika desa-desa dikelompokkan berdasarkan perubahan pola penghidupan. Namun, variasi menarik tampak pada pengelompokan desa berdasarkan wilayah. Terlepas dari hal itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator perekonomian desa yang lebih maju berkorelasi dengan ketimpangan desa yang lebih tinggi. Namun, pembangunan yang dapat dinikmati sampai lapisan masyarakat termiskin berkorelasi dengan tingkat ketimpangan

yang lebih rendah. Sementara itu, upaya pelembagaan aksi kolektif masyarakat tanpa memperhitungkan struktur sosial yang hierarkis diduga justru akan melanggengkan ketimpangan dalam desa.

4.3.1 Korelasi antara Indikator Perekonomian Desa yang Lebih Maju dan Tingkat Ketimpangan yang Lebih Tinggi

Analisis determinan ketimpangan dalam desa menunjukkan kecenderungan ketimpangan yang tinggi di desa-desa maju. Kemajuan pembangunan desa tersebut dapat diamati terutama dari tersedianya saluran irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pekerja di sektor pertanian dan keberagaman sektor pekerjaan yang digeluti masyarakat desa. Keragaman sektor pekerjaan tersebut, di satu sisi, menandakan makin luasnya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan dan, di sisi lain, menunjukkan makin berkurangnya ketergantungan masyarakat desa pada sektor pertanian. Bukti bahwa kedua indikator tersebut berkorelasi dengan ketimpangan yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan yang digalakkan di wilayah perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan baik di sektor pertanian maupun nonpertanian masih belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menggambarkan terjadinya proses pembangunan di perdesaan sebagaimana dikemukakan oleh Kuznets (1955) mengenai hubungan U-terbalik antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan.

Dalam hal pembangunan saluran irigasi, ketersediaan sarana pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pada kenyataannya, terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang sangat besar di antara rumah-rumah tangga petani sehingga manfaat pembangunan saluran irigasi ini cenderung dinikmati oleh segelintir petani saja, yaitu petani yang memiliki lebih dari dua hektare lahan. Perhitungan dengan menggunakan data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa 55% lahan pertanian di wilayah perdesaan dikuasai oleh 14% rumah tangga pertanian. Sebaliknya, lebih dari separuh rumah tangga pertanian di perdesaan hanya menguasai 11,31% lahan pertanian yang ada (BPS, 2013). Hal ini berarti bahwa rata-rata petani hanya menguasai kurang dari setengah hektare lahan dan ada kemungkinan besar bahwa lahan tersebut sebenarnya adalah lahan pekarangan rumah. Dengan kata lain, lebih dari separuh rumah tangga petani perdesaan bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah, bukan sebagai petani penggarap yang mendapatkan porsi bagi hasil dari pengolahan lahan, apalagi sebagai petani pemilik lahan. Oleh karena itu, manfaat perbaikan saluran irigasi akan lebih dinikmati oleh petani-petani penguasa lahan yang proporsinya tidak mencapai 15%. Korelasi positif antara pembangunan saluran irigasi di desa dan ketimpangan yang lebih tinggi hanya ditemukan di kelompok wilayah luar Pulau Jawa dan kelompok wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini konsisten dengan distribusi penguasaan lahan di wilayah-wilayah tersebut yang lebih timpang dibandingkan dengan di Pulau Jawa atau di wilayah Indonesia bagian barat lainnya. Hubungan serupa antara pembangunan pertanian dan ketimpangan juga terjadi di India. Bajar dan Rajeev (2016) menemukan bahwa ketika pembangunan listrik secara besar-besaran di India dilakukan di perdesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, petani pemilik lahanlah yang lebih banyak menikmati manfaat listrik sehingga ketimpangan yang sudah ada justru makin besar.

Seiring dengan fakta bahwa pembangunan di sektor pertanian berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi, terbukanya kesempatan kerja di sektor nonpertanian ternyata juga ditemukan berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari korelasi positif antara EDI dan ketimpangan di desa yang lebih tinggi. Terbukanya kesempatan kerja di sektor nonpertanian tersebut dimungkinkan oleh perbaikan akses jalan keluar dan masuk desa yang telah meningkatkan arus perputaran orang dan barang. Meski demikian, pada studi ini perbaikan jalan memiliki pengaruh yang lemah pada ketimpangan dalam desa dan cenderung hanya terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Terlepas dari hal itu, pada saat akses keluar dan masuk desa

terbuka, terbuka pula kesempatan bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di sektor nonpertanian, baik di desa mereka sendiri maupun di desa-desa lain. Namun, ketika sektor nonpertanian tersebut didominasi pekerjaan formal atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, hanya masyarakat kelompok kesejahteraan atas dengan sumber daya yang memadai dapat menjangkaunya.

Banyak studi telah membuktikan dampak positif dari sektor nonpertanian terhadap pembangunan desa (seperti Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto, 2009; Cherdchuchai dan Otsuka, 2006; Bezu dan Barrett, 2012). Berdasarkan data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 2000, 2007, dan 2014, Warda *et al.* (2018) menemukan adanya peningkatan proporsi orang yang beralih dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, dari 10% dalam periode 2000–2007 menjadi 27,7% dalam periode 2007–2014. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan pendapatan riil lebih dari 50% ketika orang-orang beralih dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.

Meskipun peluang di sektor nonpertanian tampak lebih menguntungkan, tidak semua orang dapat mengakses kesempatan untuk bekerja di sektor tersebut (Barrett, Reardon, dan Webb, 2001; Barrett *et al.*, 2001). Terdapat hambatan besar untuk memasuki sektor nonpertanian, seperti keterbatasan informasi, rendahnya kemampuan, usia yang terlalu tua, dan terbatasnya jejaring sosial. Suryahadi, Marshan, dan Indrio (2018) juga menemukan bahwa orang-orang yang memiliki akses terhadap lahan dan kemampuan mengolahnya dengan teknologi lebih maju berpeluang lebih besar untuk beralih ke sektor nonpertanian. Terjadinya ketimpangan yang lebih besar dalam penguasaan lahan menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki sumber daya komprehensif yang lebih bisa menikmati peluang dari sektor nonpertanian yang menguntungkan, seperti pekerjaan formal atau usaha berskala menengah-besar. Ketimpangan ini menyisakan orang-orang dengan sumber daya terbatas untuk bekerja di sektor nonpertanian yang keuntungannya kecil, seperti pekerjaan berupah rendah atau kegiatan usaha berskala kecil (Barrett *et al.*, 2001; Gautam dan Andersen, 2016). Oleh karena itu, keberagaman modal penghidupan yang dimiliki suatu rumah tangga akan menentukan jenis sektor nonpertanian yang diakses (Martin dan Lorenzen, 2016) dan dampaknya pada ketimpangan.

4.3.2 Pembangunan Inklusif sebagai Faktor Penentu Rendahnya Ketimpangan di Desa

Meskipun indikator kemajuan perekonomian desa ditemukan berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, studi ini mengonfirmasi bahwa pembangunan ekonomi yang menasar sampai masyarakat termiskin berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Beberapa indikator yang menggambarkan hal ini adalah proporsi yang hampir sama antara rumah tangga termiskin dan terkaya yang dapat mengakses listrik, peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, ketersediaan lembaga keuangan mikro yang lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin, dan peningkatan capaian pendidikan masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa terbukanya akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber modal penghidupan akan meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan lebih tinggi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat ketimpangan.

Pembangunan infrastruktur dapat membuka peluang bagi kelompok berpendapatan terbawah untuk mengakses aset-aset produktif sehingga terjadi peningkatan nilai modal mereka (Charlery, Qaim, dan Smith-Hall, 2016). Kemudahan akses berkat keberadaan infrastruktur—termasuk telekomunikasi, listrik, jalan, air bersih, dan sanitasi—berperan penting dalam mengintegrasikan individu dan rumah tangga ke dalam kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk dalam pemanfaatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan modal manusia mereka (Ferranti *et al.*, 2003).

Studi ini menemukan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses listrik berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah dan hal ini secara konsisten terjadi di semua wilayah. Melalui data Susenas 2006–2016, Warda *et al.* (2018) menemukan konvergensi pada akses rumah tangga terhadap listrik antarkelompok kesejahteraan di area perdesaan, serta antara perdesaan dan perkotaan. Pada 2006, listrik dapat diakses oleh sekitar 74% rumah tangga yang berada dalam 20% kelompok termiskin dan 85% rumah tangga dari kelompok kuintil terkaya. Dengan kata lain, selisih akses terhadap listrik di antara keduanya adalah 11%. Namun, sepuluh tahun kemudian, kesenjangan di antara keduanya tersisa 6,5%. Bahkan, tidak lagi teramati perbedaan signifikan antara kelompok perdesaan dan kelompok perkotaan. Bertambahnya proporsi rumah tangga miskin yang ikut menikmati hasil pembangunan berarti bahwa manfaat yang didapat orang miskin dan rentan dalam usaha mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka lebih besar. Hal ini mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan.

Temuan studi pada indikator-indikator terkait sektor kesehatan menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Namun, tidak terjadi perbaikan kondisi lingkungan sehingga penanganan kejadian malnutrisi di perdesaan makin sulit. Studi ini menemukan bahwa di seluruh wilayah Indonesia peningkatan jumlah fasilitas kesehatan berbanding lurus dengan ketimpangan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan terjadinya pemerataan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, baik kelompok menengah bawah maupun kelompok menengah atas dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk melipatgandakan keuntungan dari investasi pada modal manusia. Sementara itu, peningkatan akses terhadap air minum layak justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Salah satu penyebab yang mungkin adalah makin melebarnya kesenjangan akses terhadap air minum layak antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya di perdesaan sebagaimana dijelaskan oleh Warda *et al.* (2018). Hal ini terjadi di semua wilayah, kecuali di wilayah Indonesia bagian timur yang akses masyarakatnya terhadap air bersih secara keseluruhan memang rendah.

Keterbatasan akses terhadap air minum layak menjadi salah satu faktor risiko utama malnutrisi pada anak-anak (Braghetta, 2006; Singh, Alagarajan, dan Ladusingh, 2015). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 (Balitbangkes¹¹ Kementerian Kesehatan, 2013), diketahui bahwa probabilitas anak untuk mengalami kekurangan gizi makin besar ketika ia tinggal di keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Lebih dari itu, kelompok termiskin cenderung lebih sering terpapar pencemaran lingkungan sehingga mereka lebih rentan terserang penyakit (Deguen dan Zmirou-Navier, 2010). Gulab (2016) menjelaskan bahwa malnutrisi dan pencemaran lingkungan adalah dua hal yang berkontribusi besar pada kematian anak di Pakistan. Dengan demikian, orang miskin dan rentan adalah kelompok yang menanggung biaya paling besar untuk mengatasi permasalahan kesehatan, baik akibat pencemaran lingkungan maupun malnutrisi. Oleh karena itu, keduanya berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi.

Dalam hal modal finansial, studi ini menemukan bahwa keberadaan bank komersial memiliki korelasi positif dengan ketimpangan. Sebaliknya, koperasi dapat berperan sebagai instrumen yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan, mengingat terdapat korelasi negatif di antara keduanya, terlebih di Pulau Jawa dan di wilayah Indonesia bagian barat lainnya. Temuan ini dapat dikaitkan dengan studi Bae, Han, dan Sohn (2012) yang menemukan bahwa peran lembaga keuangan di suatu wilayah dalam menentukan tingkat ketimpangan dipengaruhi sistem keuangan di wilayah tersebut dan sistem keuangan seperti koperasilah yang masih dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat perdesaan.

¹¹Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Dalam usaha untuk mengakses layanan keuangan formal, salah satu hambatan yang dihadapi orang miskin dan rentan adalah terbatasnya kepemilikan aset sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah sertifikasi lahan atau bangunan karena prevalensi kepemilikan tanah/bangunan tanpa sertifikat di antara orang-orang miskin masih sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh data Sakerti 2014 (The Rand Corporation, n.d.). Sumarto *et al.* (2002) menemukan bahwa sertifikasi lahan mendorong peningkatan penggunaan lahan bersertifikat sebagai jaminan pinjaman oleh rumah tangga pada kuintil terbawah. Faktor penting lain yang menghalangi akses masyarakat miskin terhadap perbankan formal adalah tingginya biaya transaksi (Allen *et al.*, 2012). Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro, atau bahkan lembaga keuangan informal, sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti bank komersial.

Salah satu temuan utama studi ini yang perlu digarisbawahi adalah korelasi negatif antara peningkatan rata-rata lama sekolah di desa dan ketimpangan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa makin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu desa, makin rendah tingkat ketimpangan di desa tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Akita (2017) yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan di perdesaan memang sedang berupaya mengejar ketertinggalannya sehingga dalam kurun 14 tahun (1997–2011) terjadi peningkatan signifikan dalam capaian pendidikan rata-rata masyarakat desa.

Korelasi negatif antara capaian pendidikan dan ketimpangan ini sangat relevan dengan banyak studi sebelumnya. Studi meta regresi yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa bukan pendidikan yang menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan akses terhadap pendidikan (Abdullah, Doucouliagos, dan Manning, 2015). Pada periode observasi studi ini, meskipun terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di desa, tidak terjadi peningkatan ketimpangan akses terhadap pendidikan. Dalam periode 2000–2010, terjadi peningkatan capaian pendidikan sebesar 23%, yakni dari 5,47 tahun pada 2000 menjadi 6,72 tahun pada 2010. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kebijakan wajib belajar enam tahun yang dikeluarkan pemerintah pada 1982 yang dampaknya mulai dirasakan setidaknya enam tahun kemudian. Kebijakan ini, sejalan dengan pemerataan pembangunan gedung SD bahkan di desa-desa terpencil, meningkatkan tingkat partisipasi SD terutama di antara masyarakat miskin. Namun, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan capaian pendidikan di antara masyarakat kaya di desa. Pengolahan data Susenas 2000 dan 2010 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam hal peningkatan lama sekolah antardesa kesejahteraan penduduk perdesaan, yaitu meningkat hanya sekitar 6,2% dari rata-rata lama sekolah pada 2000. Sebaliknya, di perkotaan tampak adanya peningkatan ketimpangan akses pendidikan dalam kurun waktu tersebut. Rata-rata lama sekolah 10% penduduk terkaya di wilayah perdesaan meningkat tiga kali lipat dari yang dialami oleh rata-rata penduduk dalam kelompok 25% termiskin. Korelasi antara peningkatan capaian pendidikan dan ketimpangan yang lebih rendah di desa dalam periode 2000–2010 belum tentu terus berlanjut pada dekade berikutnya. Warda *et al.* (2018) menemukan bahwa, dalam periode 2006–2016, ketimpangan capaian pendidikan, terutama pendidikan tinggi, antara kelompok termiskin dan terkaya makin lebar.

4.3.3 Pelembagaan Aksi Kolektif Masyarakat dan Potensinya pada Tingkat Ketimpangan yang Lebih Tinggi

Studi ini menemukan bahwa aksi kolektif masyarakat, yaitu aksi gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, justru berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa. Sementara itu, kejadian kriminalitas yang menunjukkan keretakan kohesi sosial tidak ditemukan dapat menjelaskan ketimpangan di tingkat desa secara signifikan. Saat observasi pada 2000–2010, terjadi proses pelembagaan aksi kolektif di Indonesia melalui berbagai program pembangunan berbasis masyarakat yang dimulai di Pulau Jawa dan

kemudian perlahan menyebar ke wilayah lain. Namun, pembangunan berbasis masyarakat justru akan memarginalkan kelompok miskin dan rentan jika diterapkan dalam masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis. Hal ini terjadi karena program pembangunan yang diharapkan melibatkan seluruh komponen masyarakat pada kenyataannya hanya dikontrol oleh elite masyarakat. Akibatnya, hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Temuan studi ini bertentangan dengan beberapa studi terdahulu mengenai hubungan antara modal sosial dan ketimpangan, baik yang mengukur modal sosial melalui kohesi sosial maupun melalui aksi kolektif masyarakat. Easterly, Ritzen, dan Woolcock (2006) mengemukakan bahwa kohesi sosial yang kuat akan menghasilkan sistem kelembagaan yang kuat pula yang pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya kohesi sosial, masyarakat akan berintegrasi dan bersatu dalam melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1995). Knack (2002) mencoba mengamati dampak modal sosial pada distribusi pendapatan dan menemukan bahwa di negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas (sebagai akibat modal sosial yang lebih kuat), pendapatan penduduk kelompok miskin cenderung meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan pendapatan kelompok kaya; hal ini mengarah pada penurunan ketimpangan kesejahteraan.

Selain itu, terdapat banyak studi yang mengungkap sisi gelap modal sosial (seperti Cleaver, 1999; 2002; 2004; Parfitt, 2004; Villalonga-Olives dan Kawachi, 2017; Titz, Cannon, dan Kruger, 2018; Barrett, 2015). Hal ini terutama berkenaan dengan klientelisme dalam tata kelola masyarakat yang hierarkis. Relasi kuasa yang timpang menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis, pembangunan berbasis masyarakat pada akhirnya juga hanya akan didominasi kelompok tertentu, dan kesempatan bagi kelompok lain untuk berpartisipasi penuh dalam proyek-proyek pembangunan akan terbatas.

Pemerintah mulai menerapkan pembangunan berbasis masyarakat setelah krisis keuangan Asia pada 1998 dalam upaya melembagakan aksi kolektif dalam masyarakat untuk memperkuat modal sosial. Tujuannya adalah menekankan pentingnya kontribusi masyarakat sendiri pada komunitasnya (Dasgupta dan Beard, 2007; Beard dan Cartmil, 2007). Pendekatan partisipatoris ini berasumsi bahwa pemanfaatan sumber daya akan menjadi lebih efisien dan proses pemberdayaan masyarakat lokal akan terjadi sehingga proses perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal menjadi lebih demokratis (Beard dan Cartmil, 2007). Pendekatan pembangunan partisipatoris di Indonesia berkembang seiring dengan terjadinya reformasi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan terpusat menjadi sistem terdesentralisasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan terdesentralisasi tersebut lahir setelah penurunan paksa rezim Soeharto yang otoriter. Oleh karena itu, di tingkat lokal, tujuan tata kelola yang partisipatoris justru dilemahkan oleh kepentingan elite dalam masyarakat yang enggan beralih dari sistem klientelisme otoriter (*authoritarian clientelism*)¹² (Widianingsih dan Morrel, 2007; Gibson dan Woolcock, 2008). Hal ini menjadi sumber utama kegagalan pencapaian tujuan pembangunan partisipatoris untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam penerapannya, pembangunan partisipatoris dalam masyarakat dilakukan melalui bentuk-bentuk aksi kolektif yang sudah terbangun di tingkat lokal, seperti pertemuan dalam lingkup kecil dan proyek pembangunan di lingkungan sekitar (Beard dan Cartmill, 2007; Sutiyo, 2017). Jika dikaitkan dengan konteks KDP, pembangunan dapat berupa aktivitas pembangunan ekonomi,

¹²*Authoritarian clientelism* merujuk pada sistem klientelistik yang marak terjadi pada zaman otoriter Soeharto. Praktik politik klientelisme ditandai dengan penguasaan sumber daya publik oleh elite minoritas; pada saat yang sama, terjadi ketergantungan klien terhadap sumber daya tersebut (Hanif, 2009).

sosial, atau infrastruktur berskala kecil yang dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya forum atau pertemuan rutin untuk memberikan ruang, insentif, dan sumber daya bagi warga desa untuk turut berkontribusi dalam memutuskan prioritas dan mengeksekusi pembangunan desa (Gibson dan Woolcock, 2008). Pada kenyataannya, Sutiyo (2017) menemukan bahwa meskipun tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan atau bentuk aksi kolektif lainnya cukup tinggi, tidak teramati adanya proses pemberdayaan yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, pembangunan partisipatoris yang terjadi lebih terwujud dalam bentuk mobilitas sumber daya daripada proses diskursus untuk memutuskan prioritas atau pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

Faktor lain yang menghalangi proses pemberdayaan semua lapisan masyarakat dalam program pembangunan partisipatoris adalah adanya sifat resiprokal atau “saling memberi” dalam interaksi sosial antaranggota masyarakat. Dalam interaksi sosial seperti ini, seseorang diharapkan dapat menginvestasikan sumber daya, baik berupa pengetahuan, waktu, maupun uang, untuk mendapatkan manfaat yang akan diperoleh dalam bentuk informasi, barang, jasa, ataupun akses terhadap kesempatan (Beard dan Cartmill, 2007). Oleh karena itu, orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah, pengetahuan terbatas, dan status ekonomi atau tingkat kesejahteraan yang rendah tidak diharapkan dapat banyak terlibat dalam masyarakat karena minimnya kontribusi yang bisa mereka berikan. Akibatnya, mereka pun menerima manfaat yang terbatas (Collier, 2002; Agrawal dan Gupta, 2005; Beard dan Cartmill, 2007).

Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang lebih tinggi ditemukan di desa-desa dengan proporsi rumah tangga dikepalai perempuan yang lebih besar. Perempuan kepala keluarga, dalam hal ini, merupakan kelompok yang keterlibatannya dalam masyarakat sangat rendah. Beard dan Cartmill (2007) menjelaskan bahwa dalam kegiatan kemasyarakatan berbasis rumah tangga, perempuan lebih berperan sebagai pasangan suami. Hal ini berarti bahwa konstruksi sosial pada pembagian peranan gender dalam masyarakat menghalangi partisipasi perempuan tanpa suami, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan publik dan tata kelola organisasi atau pemerintahan desa. Pada akhirnya, perempuan kepala rumah tangga tidak dapat mengakses manfaat sumber daya sosial yang ada dalam masyarakat.

Sifat pembangunan yang resiprokal dapat dikaitkan dengan konteks dualisme fungsi modal sosial, yaitu menguatkan solidaritas dalam kelompok yang homogen (*bonding social capital*) dan menjembatani perbedaan antarkelompok yang heterogen (*bridging social capital*) (Putnam, 2007). Solidaritas dalam kelompok akan menguat ketika terdapat keberagaman dalam masyarakat karena keberagaman tersebut akan mempertajam perbedaan antarkelompok. Hal ini menjelaskan polarisasi aksi kolektif dalam masyarakat sesuai dengan besarnya ekspektasi manfaat yang dapat diberikan oleh anggota masyarakat tersebut. Dengan kata lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dan akses informasi dan jejaring yang lebih luas akan cenderung berjejaring dengan masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang setara karena akan lebih menguntungkan (Collier, 2002). Sebaliknya, masyarakat dengan pengetahuan terbatas yang pada umumnya juga berada di tingkat kesejahteraan terendah akan berjejaring dengan sesamanya. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan pengetahuan lebih luas akan memiliki jejaring modal sosial yang makin luas pula dan kelompok miskin akan makin termarginalkan. Seharusnya kedua fungsi modal sosial tersebut saling melengkapi, bukan saling meniadakan (Putnam, 2007). Tanpa adanya *bridging social capital*, modal sosial hanya akan mengeksklusikan orang dari kelompok lain dan mereproduksi hierarki sosial yang sudah ada dalam masyarakat (Whittaker dan Holland-Smith, 2016). Dengan besarnya hambatan yang harus dihadapi kelompok miskin untuk ikut terlibat secara aktif dalam aksi kolektif dalam masyarakat (Cleaver, 2004), kohesi sosial tersebut akan cenderung melanggengkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, dan tujuan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa yang lebih adil, seperti yang diharapkan terjadi dalam pembangunan partisipatoris, tidak akan tercapai.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan 20 indikator modal penghidupan dan 3 indikator kontrol tingkat kesejahteraan desa, studi ini menemukan bahwa sebagian besar indikator modal penghidupan di desa memiliki korelasi positif dengan ketimpangan yang lebih tinggi; hanya 4 dari 23 indikator yang menunjukkan korelasi dengan ketimpangan desa yang lebih rendah. Keempat indikator tersebut adalah (i) akses rumah tangga terhadap listrik yang lebih tinggi, (ii) rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk yang lebih kecil, (iii) rata-rata lama sekolah masyarakat desa yang lebih tinggi, dan (iv) keberadaan koperasi di desa. Analisis heterogenitas tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan jika desa-desa dikelompokkan berdasarkan perubahan pola penghidupan. Namun, variasi menarik ditemukan pada analisis dengan pengelompokan desa berdasarkan area geografis.

Hasil studi ini menunjukkan beratnya tantangan kebijakan pengendalian ketimpangan di desa karena sebagian besar indikator pembangunan ekonomi dan sosial justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Tingkat kesejahteraan desa yang makin tinggi, ketersediaan sektor pekerjaan yang makin beragam, keberadaan kompleks pertokoan, perbaikan akses terhadap air minum layak, dan pembangunan saluran irigasi di desa—terutama pada kelompok wilayah Indonesia bagian timur dan kelompok wilayah luar Pulau Jawa—merupakan indikator-indikator yang secara signifikan berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ketimpangan yang tinggi lebih banyak dialami oleh desa-desa yang lebih maju secara ekonomi dan hal ini sangat mungkin disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap kesempatan antara kelompok termiskin dan terkaya di desa. Hal ini ditunjukkan pula oleh indikator aksi kolektif masyarakat yang justru berkorelasi dengan ketimpangan dalam desa yang lebih tinggi. Struktur sosial di desa yang hierarkis menghambat kelompok termiskin untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan ikut merasakan manfaat pembangunan berbasis masyarakat yang diterapkan melalui pelebagaan aksi kolektif di desa. Di sisi lain, studi ini membuktikan bahwa manfaat pembangunan yang dapat dirasakan sampai pada masyarakat termiskin berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah. Indikator-indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah akses rumah tangga yang lebih baik terhadap listrik, rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk yang lebih baik, rata-rata lama sekolah penduduk desa yang lebih tinggi, dan koperasi yang tersedia di desa.

Pembangunan memang tidak bisa secara otomatis mengentaskan masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan dan mendorong mereka mendaki tangga kesejahteraan agar tercapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Langkah-langkah afirmatif yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka juga dapat merasakan manfaat pembangunan. Tanpa mengutamakan inklusi kelompok miskin dan rentan, pembangunan di tengah struktur sosial yang hierarkis hanya akan disambut oleh masyarakat yang sudah memiliki sumber daya komprehensif dalam hal pengetahuan, finansial, informasi, dan jejaring sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika pembangunan di perdesaan hanya akan melanggengkan ketimpangan.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Abdul Jabbar, Hristos Doucouliagos, dan Elizabeth Manning (2015) 'Education and Income Inequality: a Meta-Regression Analysis.' *Journal of Economic Surveys* 29 (2): 301–316.
- Agrawal, Arun dan Krishna Gupta (2005) 'Decentralization and Participation: the Governance of Common Pool Resources in Nepal's Terai.' *World Development* 33 (7): 1101–1114.
- Aguirreche, A. Lecuona (2012) *Inequality of Opportunity in Education*. Disertasi magister yang tidak dipublikasikan, Universidade Del Pais Vasco.
- Akita, Takahiro (2017) 'Educational Expansion and the Role of Education in Expenditure Inequality in Indonesia since the 1997 Financial Crisis.' *Social Indicators Research* 130 (3): 1165–1186.
- Allen, Franklin, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, dan Maria Soledad Martinez Peria (2012) 'The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts.' *Journal of Financial Intermediation* 27: 1–30.
- Ashraf, Nava, Edward Glaeser, Abraham Holland, dan Bryce Millett Steinberg (2017) 'Water, Health, and Wealth.' Working Paper 23807. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (2013) *Riset Kesehatan Dasar: Riskesdas 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Badan Pusat Statistik (2018) *Gini Ratio Provinsi 2002–2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . (2013) *Sensus Rumah Tangga Petani*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bae, Kwangbin, Dongsook Han, dan Hosung Sohn (2012) 'Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level.' *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Bajar, Sumedha dan Meenakshi Rajeev (2016) 'The Impact of Infrastructure Provisioning on Inequality in India: Does the Level of Development Matter?' *Journal of Comparative Asian Development* 15 (1): 122–155.
- Barrett, Christopher B., Mesfin Bezuneh, Daniel C. Clay, dan Thomas Reardon (2001) 'Heterogeneous Constraints, Incentives and Income Diversification Strategies in Rural Africa.' Working Paper. New York: Department of Applied Economics and Management, Cornell University.
- Barrett, Christopher B., Thomas Reardon, dan Patrick Webb (2001) 'Income Diversification and Household Livelihood Strategies in Rural Africa: Concepts, Dynamics, and Policy Implications.' *Food Policy* 26: 315–331.
- Barrett, Gene (2015) 'Deconstructing Community.' *Sociologia Ruralis* 55 (2): 182–204.

- Baumgärtner, Stefan (2006) *Measuring the Diversity of What? And for What Purpose? A Conceptual Comparison of Ecological and Economic Biodiversity Indices* [dalam jaringan] <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894782> [5 Desember 2017].
- Beard, Victoria dan Randi Cartmill (2007) 'Gender, Collective Action and Participatory Development in Indonesia.' *International Development Planning Review* 29 (2): 185–213.
- Bezu, Sosina dan Christopher Barrett (2012) 'Employment Dynamics in the Rural Nonfarm Sector in Ethiopia: Do the Poor Have Time on Their Side?' *Journal of Development Studies* 48: 1223–1240.
- Bhatnagar, Deepti, Ankita Dewan, Magui MorenoTorres, dan Parameeta Kanungo (2003) 'Kecamatan Development Project.' Empowerment Case Studies. Washington, DC: World Bank.
- Blaug, Mark (1976) 'The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey.' *Journal of Economic Literature* 14 (3): 827–855.
- Botterman, Sarah (2015) *An Empirical Multilevel Study of Relation between Community Level Social Cohesion Indicators and Individual Social Capital in Flanders, Belgium*. Tesis doctoral yang tidak dipublikasikan, KU Leuven.
- Boyce, J. (1994) 'Inequality as a Cause of Environmental Degradation.' *Ecological Economics* 11 (3): 168–178.
- Braghetta, A. (2006) 'Drawing the Connection between Malnutrition and Lack of Safe Drinking Water in Guatemala.' *American Water Works Association* 98 (5): 97–106.
- Calderon, Cesar dan Luis Serven (2004) 'The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution.' Policy Research Working Paper No. WPS 3400. Washington, DC: World Bank.
- Castelló, Amparo dan Rafael Doménech (2002) 'Human Capital Inequality and Economic Growth: Some New Evidence.' *The Economic Journal* 112 (478): 187–200.
- Charlery, Lindy C., Matin Qaim, dan Carsten Smith-Hall (2016) 'Impact of Infrastructure on Rural Household Income and Inequality in Nepal.' *Journal of Development Effectiveness* 8 (2): 266–286.
- Cherdchuchai, Supattra dan Keijiro Otsuka (2006) 'Rural Income Dynamics and Poverty Reduction in Thai Villages from 1987 to 2004.' *Agricultural Economics* 35 (s3): 409–423.
- Chiritescu, Vergina, Mariana Balan, dan Ciprian Silviu Bucur (2015) 'The Quality of Human Resources—A Determinant of Sustainable Rural Development in Romania.' *Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy* 40 (1 [49]): 267–280.
- Clarke, G., Lixin Colin Xue dan Heng-fu Zou (2006) 'Finance and Income Inequality.' *Southern Economic Journal* 72: 578–596.
- Cleaver, Frances (2004) 'The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty.' *World Development* 33 (6): 893–906.

- . (2002) 'Reinventing Institutions: Bricolage and the Social Embeddedness of Natural Resource Management.' *European Journal of Development Research* 14 (2): 11–30.
- . (1999) 'Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to Development.' *Journal of International Development* 11 (4): 597–612.
- Coleman, J. (1988) 'Social Capital in the Creation of Human Capital.' *American Journal of Sociology* 94: S95–S120.
- Collier, Paul (2002) 'Social Capital and Poverty: a Microeconomic Perspective.' Dalam *The Role of Social Capital in Development*. Christiaan Grootaert dan Thierry van Bastelaer (eds.) Cambridge: Cambridge University Press: 19–41.
- Dasgupta, Aniruddha dan Victoria A. Beard (2007) 'Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia.' *Development and Change* 38 (2): 229–249.
- Deguen, Severine dan Denis Zmirou-Navier (2010) 'Social Inequalities Resulting from Health Risks Related to Ambient Air Quality—A European Review.' *The European Journal of Public Health* 20 (1): 27–35.
- Department for International Development (2001) *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets* [dalam jaringan] <http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html> [5 Desember 2017].
- Dewi, Sonya, Brian Belcher, dan Atie Puntodewo (2004) 'Village Economic Opportunity, Forest Dependence and Rural Livelihoods in East Kalimantan, Indonesia.' *World Development* 33 (9): 1419–1434.
- DiCiccio, Thomas J. dan Bradley Efron (1996) 'Bootstrap Confidence Intervals.' *Statistical Science* 11 (3): 189–228.
- Easterly, William (2001) 'Can Institutions Resolve Ethnic Conflict?' *Economic Development and Cultural Change* 49 (4): 687–706.
- Easterly, William, Jozef Ritzen, dan Michael Woolcock (2006) 'Social Cohesion, Institutions, and Growth.' *Economics & Politics* 18 (2): 103–120.
- Efron, B. (1979) 'Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife.' *The Annals of Statistics* 7 (1): 1–26.
- Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, dan Peter Lanjouw (2003) 'Micro-level Estimation of Poverty and Inequality.' *Econometrica* 71 (1): 355–364.
- Ferranti, David D., Guillermo E. Perry, Francisco H.G. Ferreira, Michael Walton, David Coady, Wendy Cunningham, Leonardo Gasparini, Joyce Jacobsen, Yasuhiko Matsuda, James Robinson, Kenneth Sokoloff, dan Quentin Wodon (2003) 'Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History.' World Bank Latin America and the Caribbean Studies. Washington, DC: The World Bank.
- Ferreira, Francisco H. G. dan Jérémie Gignoux (2011) 'The Measurement of Inequality of Opportunity: Theory and an Application to Latin America.' *The Review of Income and Wealth* 57 (4): 622–657.

- Ford Foundation (2002) *Building Assets to Reduce Poverty and Injustice*. New York: Ford Foundation.
- Furlong, Kathryn dan Michelle Kooy (2017) 'Worlding Water Supply: Thinking Beyond the Network in Jakarta.' *International Journal of Urban and Regional Research* 41 (6): 888–903.
- Gautam, Yograj dan Peter Andersen (2016) 'Rural Livelihood Diversification and Household Well-Being: Insights from Humla, Nepal.' *Journal of Rural Studies* 44: 239–249.
- Gibson, C. dan M. Woolcock (2008) 'Empowerment, Deliberative Development, and Local-Level Politics in Indonesia: Participatory Projects as a Source of Countervailing Power.' *Studies in Comparative International Development* 43 (2): 151–180.
- Gujarati, Damodar N. and Dawn C. Porter (2009) *Basic Econometrics*. 5th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Gulab, A. (2016) *Environmental Pollution and Malnutrition* [dalam jaringan] <<https://nation.com.pk/28-Oct-2016/environmental-pollution-and-malnutrition?show=2>> [12 Oktober 2018].
- Halac, Marina dan Sergio Schmukler (2003) 'Distributional Effects of Crises: The Role of Financial Transfers.' Working Paper 3173. Washington, DC: The World Bank.
- Hanif, Hasrul (2009) 'Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia.' *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12 (3): 257–390.
- Honohan, P. (2004) 'Financial Sector Policy and the Poor: Selected Findings and Issues.' World Bank Working Paper Series No. 43. Washington, DC: The World Bank.
- Hoynes, Hilary W., Diane W. Schanzenbach, dan Douglas Almond (2012) 'Long Run Impacts of Childhood Access to the Safety Net.' Working Paper. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Johnson, R. C. dan Robert F. Schoeni (2011) 'Early-Life Origins of Adult Disease: National Longitudinal Population-Based Study of the United States.' *American Journal of Public Health* 101: 2317–2324.
- Johnson, Roger W. (2001) 'An Introduction to the Bootstrap.' *Teaching Statistics* 23 (2): 49–54.
- Keller, Katarina R. I. (2010) 'How Can Education Policy Improve Income Distribution? An Empirical Analysis of Education Stages and Measures on Income Inequality.' *The Journal of Developing Areas* 43 (2): 51–77.
- Knack, Stephen (2002) 'Social Capital, Growth, and Poverty: a Survey of Cross-Country Evidence.' Dalam *The Role of Social Capital in Development: an Empirical Assessment*. Christopher Grootaert dan Thierry van Bastelaer (eds.) Cambridge: Cambridge University Press: 19–41.
- Knack, Stephen dan Philip Keefer (1997) 'Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation.' *Quarterly Journal of Economics* 112 (4): 1251–1288.

- Kuznets, Simon (1955) 'Economic Growth and Income Inequality.' *The American Economic Review* 45 (1): 1–28.
- Liker, Jeffrey K., Sue Augustyniak, dan Greg Duncan (1985) 'Panel Data and Models of Change: a Comparison of First Difference and Conventional Two-Wave Models.' *Social Science Research* 14 (1): 80–101.
- Long, Norman (2001) *Development Sociology: Actor Perspectives*. London: Routledge.
- Marrero, Gustavo dan Luis Serven (2018) 'Growth, Inequality, and Poverty: A Robust Relationship?' Policy Research Working Paper 8578. Washington, DC: World Bank Group.
- Martin, Sarah M. dan Kai Lorenzen (2016) 'Livelihood Diversification in Rural Laos.' *World Development* 83: 231–243.
- Moser, Caroline (2006) 'Asset-Based Approaches to Poverty Reduction in a Globalized Context.' Washington, DC: The Brooking Institution.
- Mussa, Richard (2014) 'Household Expenditure Components and the Poverty and Inequality Relationship in Malawi.' *African Development Review* 26 (1): 138–147.
- Negara, Radi dan Sudarno Sumarto (2014) 'The Poverty Map of Indonesia 2010.' Laporan tidak dipublikasikan, The SMERU Research Institute.
- Parfitt, Trevor (2004) 'The Ambiguity of Participation: a Qualified Defence of Participatory Development.' *Third World Quarterly* 25 (3): 537–555.
- Park, K. H. (1996) 'Educational Expansion and Educational Inequality on Income Distribution.' *Economics of Education Review* 15 (1): 51–58.
- Pollock, Ian Frank Solomon, Anita Ellen Kendrick, Peter Kjaer Milne, Lily Hoo, dan Vinny Flaviana H. (2015) '15 Years of Indonesia's National Community-Driven Development Programs: the *Kecamatan* Development Program (KDP), The National Program for Community Empowerment.' Jakarta: The World Bank-PNPM Support Facility.
- Putnam, Robert D. (2007) '*E Pluribus Unum*: Diversity and Community in the Twenty-first Century—The 2006 Johan Skytte Prize Lecture.' *Scandinavian Political Studies* 30 (2): 137–74.
- . (1995) 'Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America.' *PS: Political Science and Politics* 28 (4): 664–83.
- Ram, Rati (1990) 'Educational Expansion and Schooling Inequality: International Evidence and Some Implications.' *The Review of Economics and Statistics* 72 (2): 266–274.
- . (1989) 'Can Educational Expansion Reduce Income Inequality in Less-Developed Countries.' *Economics of Education Review* 8 (2): 185–195.
- Roemer, John E. (1998) *Equality of Opportunity*. Cambridge: Harvard University Press.

- Siegel, P. (2005) 'Using an Asset-Based Approach to Identify Drivers of Sustainable Rural Growth and Poverty reduction in Central America: A Conceptual Framework.' Environmentally and Socially Sustainable Development Policy Research Working Paper 3475. Washington, DC: The World Bank.
- Sim, Armand, Radi Negara, dan Asep Suryahadi (2015) 'Inequality, Elite Capture, and Targeting of Social Protection Programs: Evidence from Indonesia.' Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Singh, K. Dinachandra, Manoj Alagarajan, dan Laishram Ladusingh (2015) 'What Explains Child Malnutrition of Indigenous People of Northeast India?' *PloS One* 10 (6): e0130567.
- Smith, G. D., Carole Hart, David Blane, Charles Gillis, dan Victor Hawthorne (1997) 'Lifetime Socioeconomic Position and Mortality: Prospective Observational Study.' *BMJ* 314: 547–552.
- Smith, J. P. (1999) 'Healthy Bodies dan Thick Wallets: The Dual Relation between Health and Economic Status.' *Journal of Economic Perspectives* 13 (2): 145–166.
- Sumarto, Sudarno, Sri Kusumastuti Rahayu, Bambang Sulaksono, Nina Toyamah, Hastuti, Sri Budiayati, Akhmadi, Wawan Munawar, Ismah Afwan, Musriyadi Nabiu, Nadrattuzaman Hosen, Asep Suryahadi, Wenefrida Dwi Widyanti, dan Daniel Perwira (2002) 'An Impact Evaluation of Systematic Land Titling under the Land Administration Project (LAP).' SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma, dan Sudarno Sumarto (2009) 'The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia.' *Journal of Development Economics* 89 (1): 109–117.
- Suryahadi, Asep, Joseph Marshan, dan Veto Tyas Indrio (2018) 'Structural Transformation and the Release of Labor from Agriculture.' Dalam *Indonesia Enhancing Productivity through Quality Jobs*. Edimon Ginting, Christopher Manning, dan Kiyoshi Taniguchi (eds.) Manila: Asian Development Bank.
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, dan Sudarno Sumarto (2005) 'Developing a Poverty Map for Indonesia: a Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Program.' SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Sutiyo (2017) *The Roles of Neighbourhood to Promote Participatory Development in Indonesia: Three Villages in Purbalingga District in Central Java* [dalam jaringan] <<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2015.0010>> [15 Oktober 2018].
- The Rand Corporation (n.d.) *The Indonesian Family Life Survey* [dalam jaringan] <<https://www.rand.org/labor/FLS/IFLS.html>> [25 Januari 2016].
- Titz, Alexandra, Terry Cannon, dan Fred Krüger (2018) 'Uncovering 'Community': Challenging an Elusive Concept in Development and Disaster Related Work.' *Societies* 8 (3): 71.
- Villalonga-Olives, E. dan I. Kawachi (2017) 'The Dark Side of Social Capital: A Systematic Review of the Negative Health Effects of Social Capital.' *Social Science & Medicine* 194: 105–127.

Warda, Nila, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Nurbani, dan Ridho Izzati (2018) 'Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan Perdesaan Indonesia, 2006–2016.' Kertas Kerja SMERU. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Widianingsih, Ida dan Elizabeth Morrell (2007) 'Participatory Planning in Indonesia.' *Policy Studies* 28 (1): 1–15.

Whittaker, C. Grant dan David Holland-Smith (2016) 'Exposing the Dark Side, an Exploration of the Influence Social Capital Has upon Parental Sports Volunteers.' *Sport, Education and Society* 21 (3): 356–373.

Woolcock, M. (2000) *Friends in High Places? An Overview of Social Capital* [dalam jaringan] <<https://eldis.org/document/A8638> > [5 Desember 2017].

Zhao, Zhongwei (2006) 'Income Inequality, Unequal Health Care Access, and Mortality in China.' *Population and Development Review* 32 (3): 461–483.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel A1. Statistika Deskriptif

Kelompok	Indikator	2000					2010				
		N ^a	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks	N	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks
Variabel Dependen	Koefisien Gini	27.584	0,17	0,03	0,01	0,44	27.584	0,21	0,04	0,07	0,53
Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama sekolah	27.584	5,47	1,64	0,03	12,82	27.584	6,72	1,53	0,88	11,99
	Proporsi penduduk usia produktif	27.584	0,64	0,05	0,36	1,00	27.584	0,65	0,04	0,42	0,86
	Insiden kekurangan gizi	27.584	0,17	0,38	0,00	1,00	27.584	0,34	0,47	0,00	1,00
	Banyaknya jenis wabah penyakit terjadi setahun terakhir	27.584	0,40	0,97	0,00	6,00	27.584	0,48	1,01	0,00	8,00
Modal Fisik	Ketersediaan saluran irigasi	27.584	0,49	0,50	0,00	1,00	27.584	0,56	0,50	0,00	1,00
	Ketersediaan sanitasi sehat	27.584	0,37	0,27	0,00	1,00	27.584	0,69	0,26	0,00	1,00
	Cakupan rumah tangga dengan akses listrik	27.584	0,61	0,27	0,00	1,00	27.584	0,92	0,18	0,00	1,00
	Rasio fasilitas kesehatan/10 penduduk	27.584	0,16	0,26	0,00	23,08	27.584	0,16	0,17	0,00	8,33
	Akses jalan keluar desa bisa dilalui kendaraan beroda empat	27.584	0,92	0,28	0,00	1,00	27.584	0,93	0,26	0,00	1,00
	Jalan terluas di desa sudah beraspal	27.584	0,52	0,50	0,00	1,00	27.584	0,75	0,43	0,00	1,00
Modal Finansial	Ketersediaan koperasi	27.584	0,38	0,49	0,00	1,00	27.584	0,45	0,50	0,00	1,00
	Ketersediaan BPR	27.584	0,13	0,33	0,00	1,00	27.584	0,06	0,24	0,00	1,00
	Ketersediaan bank	27.584	0,04	0,20	0,00	1,00	27.584	0,07	0,25	0,00	1,00
	Ketersediaan pasar permanen	27.584	0,15	0,35	0,00	1,00	27.584	0,20	0,40	0,00	1,00
	Ketersediaan kompleks pertokoan	27.584	0,08	0,27	0,00	1,00	27.584	0,12	0,32	0,00	1,00
Modal Sosial	Banyaknya jenis upaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	27.584	2,31	1,40	0,00	5,00	27.584	1,47	1,28	0,00	5,00
	Adanya kegiatan kerja bakti/gotong royong	27.584	0,95	0,21	0,00	1,00	27.584	0,91	0,29	0,00	1,00
	Banyaknya jenis kriminalitas terjadi	27.584	0,58	0,64	0,00	4,00	27.584	0,49	0,60	0,00	4,00

Kelompok	Indikator	2000					2010				
		N ^a	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks	N	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks
Sumber Daya Alam	Banyaknya jenis pencemaran terjadi	27.584	0,15	0,44	0,00	3,00	27.584	0,24	0,54	0,00	3,00
	Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak	27.584	0,51	0,30	0,00	1,00	27.584	0,78	0,29	0,00	1,00
Kontrol Kondisi Kesejahteraan	Indeks keragaman ekonomi (<i>economic diversity index</i>)	27.584	0,51	0,23	0,00	0,99	27.584	0,65	0,23	0,00	0,99
	Rata-rata konsumsi per kapita	27.583	11,55	0,22	10,61	12,76	27.584	11,97	0,29	10,95	15,21
	Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan	27.584	0,42	0,20	0,00	0,99	27.584	0,14	0,06	0,00	0,55

^aJumlah sampel.

LAMPIRAN 2

Tabel A2. Hasil Estimasi Model OLS

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa		Berdasarkan Wilayah Geografis					Berdasarkan Perubahan Penghidupan			
		Perdesaan	Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama sekolah	-0,002*** (0,000)	-0,006*** (0,000)	0,000 (0,000)	-0,002*** (0,001)	-0,002*** (0,000)	-0,002*** (0,000)	-0,009** (0,004)	-0,006*** (0,002)	-0,006*** (0,002)
	Proporsi penduduk usia produktif	0,015** (0,007)	0,089*** (0,011)	-0,029*** (0,010)	-0,027 (0,018)	0,019** (0,008)	0,014* (0,008)	0,303*** (0,080)	0,029 (0,045)	0,029 (0,045)
	Insiden kekurangan gizi	0,001*** (0,000)	0,002*** (0,000)	0,001 (0,001)	0,002** (0,001)	0,001*** (0,000)	0,001** (0,000)	0,006 (0,004)	0,003 (0,002)	0,003 (0,002)
	Banyaknya jenis wabah penyakit terjadi setahun terakhir	-0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	-0,001 (0,000)	-0,000 (0,000)	-0,000* (0,000)	0,000 (0,001)	0,001 (0,001)	0,001 (0,001)
Modal Fisik	Ketersediaan saluran irigasi	0,001** (0,000)	0,000 (0,001)	0,002*** (0,001)	0,004*** (0,001)	0,001 (0,000)	0,001** (0,000)	-0,004 (0,006)	0,001 (0,002)	0,001 (0,002)
	Ketersediaan sanitasi sehat	0,002 (0,001)	0,004** (0,002)	0,000 (0,001)	-0,005* (0,003)	0,002 (0,001)	0,001 (0,001)	-0,005 (0,015)	0,014* (0,008)	0,014* (0,008)
	Cakupan rumah tangga dengan akses listrik	-0,015*** (0,001)	-0,013*** (0,001)	-0,015*** (0,002)	-0,027*** (0,003)	-0,013*** (0,001)	-0,016*** (0,001)	0,025 (0,020)	-0,004 (0,009)	-0,004 (0,009)
	Rasio fasilitas kesehatan/10 penduduk	-0,010*** (0,001)	-0,012** (0,005)	-0,008*** (0,001)	-0,008*** (0,001)	-0,012*** (0,002)	-0,010*** (0,001)	-0,016 (0,020)	-0,009*** (0,002)	-0,009*** (0,002)
		-0,002**	-0,001	-0,000	-0,000	-0,002**	-0,001	-0,007	-0,008	-0,008

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa		Berdasarkan Wilayah Geografis					Berdasarkan Perubahan Penghidupan			
		Perdesaan	Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Akses keluar desa bisa dilalui kendaraan beroda empat	(0,001)	(0,002)	(0,001)	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,009)	(0,007)	(0,007)
	Jalan terluas di desa sudah beraspal	0,000 (0,000)	-0,000 (0,001)	0,002*** (0,001)	0,001 (0,001)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	-0,012** (0,005)	-0,003 (0,003)	-0,003 (0,003)
Modal Finansial	Ketersediaan koperasi	-0,004*** (0,000)	-0,006*** (0,000)	-0,000 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,004*** (0,000)	-0,004*** (0,000)	-0,011*** (0,003)	-0,002 (0,002)	-0,002 (0,002)
	Ketersediaan BPR	-0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,000 (0,003)	0,004 (0,005)	-0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,003 (0,006)	0,002 (0,003)	0,002 (0,003)
	Ketersediaan Bank	0,002* (0,001)	0,002 (0,001)	0,001 (0,002)	0,003 (0,004)	0,002 (0,001)	0,001 (0,001)	0,001 (0,007)	0,009** (0,004)	0,009** (0,004)
	Ketersediaan pasar permanen	0,000 (0,001)	-0,000 (0,001)	0,000 (0,001)	0,001 (0,002)	0,000 (0,001)	0,000 (0,001)	0,005 (0,006)	-0,002 (0,003)	-0,002 (0,003)
	Ketersediaan kompleks pertokoan	0,004*** (0,001)	0,003*** (0,001)	0,005*** (0,001)	0,003 (0,003)	0,004*** (0,001)	0,004*** (0,001)	-0,001 (0,006)	0,002 (0,003)	0,002 (0,003)
Modal Sosial	Banyaknya jenis upaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	0,000** (0,000)	0,000** (0,000)	-0,000 (0,000)	0,001*** (0,000)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	0,001 (0,001)	0,000 (0,001)	0,000 (0,001)
	Adanya kegiatan kerja bakti/gotong royong	0,002** (0,001)	0,005*** (0,001)	0,000 (0,001)	0,002 (0,002)	0,002*** (0,001)	0,002*** (0,001)	-0,003 (0,007)	-0,000 (0,004)	-0,000 (0,004)

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa		Berdasarkan Wilayah Geografis					Berdasarkan Perubahan Penghidupan			
		Perdesaan	Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian
	Banyaknya jenis kriminalitas terjadi	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,001)	(0,000)	(0,000)	(0,002)	(0,002)	(0,002)
Sumber Daya Alam	Banyaknya jenis pencemaran terjadi	0,003*** (0,001)	0,003*** (0,001)	0,004*** (0,001)	0,009*** (0,002)	0,003*** (0,001)	0,003*** (0,001)	-0,027*** (0,009)	-0,000 (0,005)	-0,000 (0,005)
	Cakupan rumah tangga dengan akses air bersih	0,002*** (0,000)	0,005*** (0,000)	-0,003*** (0,001)	-0,001 (0,001)	0,002*** (0,000)	0,003*** (0,000)	0,001 (0,003)	-0,003* (0,002)	-0,003* (0,002)
	Kontrol Kondisi Kesejahteraan	Indeks keragaman ekonomi (<i>economic diversity index</i>)	0,020*** (0,002)	0,024*** (0,002)	0,018*** (0,002)	0,029*** (0,004)	0,019*** (0,002)	0,019*** (0,002)	-0,001 (0,018)	0,027*** (0,010)
	Rata-rata konsumsi per kapita	0,069*** (0,001)	0,087*** (0,001)	0,042*** (0,002)	0,050*** (0,003)	0,072*** (0,001)	0,069*** (0,001)	0,095*** (0,010)	0,075*** (0,006)	0,075*** (0,006)
	Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan	0,040*** (0,001)	0,034*** (0,002)	0,046*** (0,003)	0,043*** (0,004)	0,040*** (0,001)	0,041*** (0,001)	0,042*** (0,014)	0,012 (0,008)	0,012 (0,008)
	Konstanta	0,023*** (0,001)	0,016*** (0,001)	0,034*** (0,001)	0,030*** (0,002)	0,021*** (0,001)	0,024*** (0,001)	0,009 (0,010)	0,010* (0,006)	0,010* (0,006)
	Jumlah observasi	27.583	16.733	10.850	3.369	24.214	25.476	467	1.213	1.213
	<i>Adjusted R2</i> ^a	0,242	0,310	0,144	0,206	0,252	0,242	0,343	0,238	0,238

Keterangan: 0,01 - ***; 0,05 - **; 0,1 - *; galat standar (*standard error*, SE) dalam kurung.

^aVersi modifikasi dari *R2* (koefisien determinasi) yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel penjelas yang digunakan dalam model.

LAMPIRAN 3

Tabel A3. Hasil Estimasi Metode *Bootstrap*

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa		Perdesaan	Berdasarkan Wilayah Geografis				Berdasarkan Perubahan Penghidupan			
			Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama sekolah	-0,002*** (0,000)	-0,006*** (0,001)	0,000 (0,000)	-0,002*** (0,001)	-0,002*** (0,000)	-0,002*** (0,000)	-0,009** (0,004)	-0,006*** (0,002)	-0,006*** (0,002)
	Proporsi penduduk usia produktif	0,015* (0,008)	0,089*** (0,009)	-0,029*** (0,009)	-0,027 (0,017)	0,019** (0,008)	0,014* (0,008)	0,303*** (0,071)	0,029 (0,042)	0,029 (0,042)
	Insiden kekurangan gizi	0,001*** (0,000)	0,002*** (0,001)	0,001 (0,001)	0,002** (0,001)	0,001** (0,000)	0,001** (0,000)	0,006 (0,005)	0,003 (0,002)	0,003 (0,002)
	Banyaknya jenis wabah penyakit terjadi setahun terakhir	-0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	-0,001 (0,000)	-0,000 (0,000)	-0,000* (0,000)	0,000 (0,001)	0,001 (0,001)	0,001 (0,001)
	Modal Fisik	Ketersediaan saluran irigasi	0,001** (0,000)	0,000 (0,001)	0,002*** (0,001)	0,004*** (0,001)	0,001 (0,000)	0,001* (0,001)	-0,004 (0,005)	0,001 (0,002)
	Ketersediaan sanitasi sehat	0,002 (0,001)	0,004* (0,002)	0,000 (0,001)	-0,005* (0,003)	0,002 (0,001)	0,001 (0,001)	-0,005 (0,015)	0,014* (0,007)	0,014* (0,007)
	Cakupan rumah tangga dengan akses listrik	-0,015*** (0,001)	-0,013*** (0,001)	-0,015*** (0,001)	-0,027*** (0,003)	-0,013*** (0,001)	-0,016*** (0,001)	0,025 (0,023)	-0,004 (0,008)	-0,004 (0,008)
	Rasio fasilitas kesehatan/10 penduduk	-0,010*** (0,001)	-0,012** (0,005)	-0,008*** (0,002)	-0,008*** (0,002)	-0,012*** (0,002)	-0,010*** (0,002)	-0,016 (0,030)	-0,009 (0,015)	-0,009 (0,015)
	Akses keluar desa bisa dilalui kendaraan beroda empat	-0,002* (0,001)	-0,001 (0,002)	-0,000 (0,001)	-0,000 (0,002)	-0,002* (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,007 (0,010)	-0,008 (0,006)	-0,008 (0,006)

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa		Perdesaan	Berdasarkan Wilayah Geografis				Berdasarkan Perubahan Penghidupan			
			Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jalan terluas di desa sudah beraspal		0,000 (0,000)	-0,000 (0,001)	0,002*** (0,001)	0,001 (0,001)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	-0,012** (0,005)	-0,003 (0,003)	-0,003 (0,003)
Modal Finansial	Ketersediaan koperasi	-0,004*** (0,000)	-0,006*** (0,000)	-0,000 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,004*** (0,000)	-0,004*** (0,000)	-0,011*** (0,004)	-0,002 (0,002)	-0,002 (0,002)
	Ketersediaan BPR	-0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,000 (0,003)	0,004 (0,005)	-0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)	-0,003 (0,006)	0,002 (0,003)	0,002 (0,003)
	Ketersediaan Bank	0,002* (0,001)	0,002 (0,001)	0,001 (0,002)	0,003 (0,004)	0,002 (0,001)	0,001 (0,001)	0,001 (0,007)	0,009*** (0,003)	0,009*** (0,003)
	Ketersediaan pasar permanen	0,000 (0,001)	-0,000 (0,001)	0,000 (0,001)	0,001 (0,001)	0,000 (0,001)	0,000 (0,001)	0,005 (0,006)	-0,002 (0,003)	-0,002 (0,003)
	Ketersediaan kompleks pertokoan	0,004*** (0,001)	0,003*** (0,001)	0,005*** (0,001)	0,003 (0,004)	0,004*** (0,001)	0,004*** (0,001)	-0,001 (0,006)	0,002 (0,003)	0,002 (0,003)
	Modal Sosial	Banyaknya jenis upaya masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	0,000** (0,000)	0,000** (0,000)	-0,000 (0,000)	0,001*** (0,000)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)	0,001 (0,001)	0,000 (0,001)
	Adanya kegiatan kerja bakti/gotong royong	0,002*** (0,001)	0,005*** (0,001)	0,000 (0,001)	0,002 (0,002)	0,002*** (0,001)	0,002*** (0,001)	-0,003 (0,007)	-0,000 (0,005)	-0,000 (0,005)
	Banyaknya jenis kriminalitas terjadi	-0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)	0,001 (0,001)	-0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)	0,000 (0,002)	0,001 (0,002)	0,001 (0,002)
Sumber Daya Alam	Banyaknya jenis pencemaran terjadi	0,003*** (0,001)	0,003*** (0,001)	0,004*** (0,001)	0,009*** (0,002)	0,003*** (0,001)	0,003*** (0,001)	-0,027*** (0,010)	-0,000 (0,005)	-0,000 (0,005)

Variabel Dependen: Indeks Gini Tingkat Desa	Perdesaan	Berdasarkan Wilayah Geografis				Berdasarkan Perubahan Penghidupan				
		Jawa	Non-Jawa	Timur	Barat	Tetap Sektor Pertanian	Tetap Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Non-pertanian	Beralih ke Sektor Pertanian	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan rumah tangga dengan akses air bersih	0,002*** (0,000)	0,005*** (0,000)	-0,003*** (0,001)	-0,001 (0,001)	0,002*** (0,000)	0,003*** (0,000)	0,001 (0,003)	-0,003* (0,002)	-0,003* (0,002)	
Kontrol Kondisi Kesejahteraan	Indeks keragaman ekonomi (<i>economic diversity index</i>)	0,020*** (0,001)	0,024*** (0,002)	0,018*** (0,002)	0,029*** (0,004)	0,019*** (0,002)	0,019*** (0,002)	-0,001 (0,019)	0,027*** (0,010)	0,027*** (0,010)
	Rata-rata konsumsi per kapita	0,069*** (0,001)	0,087*** (0,001)	0,042*** (0,002)	0,050*** (0,004)	0,072*** (0,001)	0,069*** (0,001)	0,095*** (0,009)	0,075*** (0,006)	0,075*** (0,006)
	Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan	0,040*** (0,001)	0,034*** (0,002)	0,046*** (0,002)	0,043*** (0,004)	0,040*** (0,002)	0,041*** (0,001)	0,042*** (0,014)	0,012 (0,009)	0,012 (0,009)
	Konstanta	0,023*** (0,001)	0,016*** (0,001)	0,034*** (0,001)	0,030*** (0,002)	0,021*** (0,001)	0,024*** (0,001)	0,009 (0,010)	0,010* (0,006)	0,010* (0,006)
Jumlah observasi	27.583	16.733	10.850	3.369	24.214	25.476	467	1.213	1.213	
<i>Adjusted R</i> ^{2a}	0,242	0,310	0,144	0,206	0,252	0,242	0,343	0,238	0,238	

Keterangan: 0,01 - ***; 0,05 - **; 0,1 - *; galat standar (*standard error*, SE) dalam kurung.

^aVersi modifikasi dari *R*² (koefisien determinasi) yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel penjelas yang digunakan dalam model.

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)

Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)

YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/channel/UC...)

